

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA SEPENCAHARIAN  
SETELAH PERCERAIAN**

**(Studi kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Syariah



**NORMINAH MAULID BT ABDULLAH**

**NIM. 10921008918**

**PROGRAM S1  
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2012**

## **Kata Pengantar**

Segala puji dan syukur hanya Allah s.w.t pencipta semesta alam dengan segala isiNya, atas limpahan Rahmat, hidayah dan petunjukNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Pembagian Harta Sepencaharian setelah perceraian (Studi kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan)

Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w dan keluarganya, selanjutnya kepada seluruh sahabat dan pengikutnya yang menyebarkan risalahnya hingga akhirnya.

Penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan di program strata satu ( SI ) untuk meraih gelaran Sarjana Hukum Islam Jurusan Akhwal Al-Syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dengan rampungan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat:

1. Suami tercinta beserta segenap keluarga yang telah berjasa tanpa kenal lelah untuk memberi sugesti dan motivasi dalam menyelesaikan studi ini dengan segala bentuk pengorbanannya baik materi maupun moril yang diiringi doa restunya kepada penulis. Kepada bunda tersayang atas perhatian dan semangat yang diberikan sepanjang pengajian ini, yang tidak jemu-jemu memberi dorongan dan sokongan.
2. Rektor UIN Suska Riau yang telah menerima penulis sebagai Mahasiswa UIN dalam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, bapak Dr.H. Akbarizan, M.Pd

4. Ketua Jurusan AHA dan Sekretaris baik yang lama Dra. Yusliati maupun yang baru Drs. Zainal Arifin
5. Pembimbing bapak Drs. Yusran Sabili, MAg yang membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Pembantu Dekan baik yang lama ataupun yang baru, terkhusus kepada bapak Drs. Hajar M, MH, Bapak Drs. M.H Yunus, MA dan Ibu Hertina, M.Pd tanpa jemu memberi tunjuk ajar kepada penulis dalam penyelesaian studi ini.
7. Semua Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.
8. Semua Karyawan dan Pustakawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.
9. Semua Bapak dan Ibu di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu yang banyak membantu untuk mendapatkan bahan penulisan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan yang banyak memberi dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan studi ini.

Semoga Allah s.w.t membalas jasa baik dan pengorbanan mereka semua.

Amin.....

## **Abstrak**

Penelitian ini berjudul: PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA SEPENCAHARIAN SETELAH PERCERAIAN (Studi kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan)

Harta sepecaharian adalah harta yang diperoleh secara usaha sama oleh suami dan istri dalam masa perkawinan yang sah. Dalam hal ini apa yang disyaratkan ialah sumbangan masing-masing ketika mendapatkan harta tersebut. Pembagian harta sepecaharian telah ditakrifkan dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan No 6 Tahun 2002 yaitu Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidang kuasa untuk menjalankan perbicaraan berhubung dengan pembagian atau tuntutan kepada harta sepecaharian. Walaupun tidak ada perkataan harta sepecaharian dalam Hukum Syarak secara jelas, namun ia adalah adat Melayu yang telah diterima dan diakui mendatangkan kebaikan. Dalam Islam apabila adat dan urf diakui kebajikannya dan telah diberi kekuatan Undang-Undang, kedudukannya adalah menjadi suatu peraturan atau perundangan yang harus diikuti dan diberlakukan.

Kedudukan harta sepecaharian dalam hukum adalah milik bersama suami istri. Apabila terjadi perceraian maka harta sepecaharian ini harus dibagi. Bagaimanakah bagiannya menurut Enakmen Keluarga Islam Kelantan seksyen 122 Tahun 2002?

Dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimanakah putusan Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan tentang pembagian harta sepecaharian di Kota Bharu Kelantan, Apakah pertimbangan dan dasar putusan hakim dalam penyelesaian kasus harta sepecaharian di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan dan Bagaimanakah analisa hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Tinggi Syariah dalam hal pembagian harta sepecaharian. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian adalah untuk mengetahui putusan Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan tentang pembagian harta sepecaharian, untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam mengeluarkan putusan dalam Enakmen Keluarga Islam Negeri Kelantan dan untuk mengetahui analisa hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Tinggi Syariah dalam pembagian harta sepecaharian.

Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan, Lokasi penelitian penulis adalah di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan. Subjek penelitian adalah kasus-kasus tuntutan harta sepecaharian dan para Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan. Populasi dalam penelitian ini adalah kasus-kasus pembagian harta sepecaharian suami istri di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan pada tahun 2010 yaitu 22 kasus jadi penulis telah mengambil 8 sample untuk diteliti. Objek penelitian adalah pelaksanaan pembagian harta sepecaharian setelah perceraian di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan. Penulis menggunakan sumber data yaitu bahan primer, bahan skunder dan bahan tertiar. Adapun metode pengumpulan data yaitu studi perpustakaan, studi dokumen dan wawancara. Di metode analisa data

penulis menggunakan metode analisa data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Data tersebut kemudian dijelaskan dengan cara menggabungkan satu fakta dengan fakta-fakta yang lain kemudian data itu dianalisa untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Dalam metode penulisan, penulis menggunakan metode penulisan deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data dan keterangan untuk dipaparkan kemudian dianalisa dengan cara menggambarkan pertimbangan Hakim dalam mengeluarkan putusan banding terhadap perkara dari Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan.

Setelah penelitian dilakukan, maka dapat dilihat bahwa pembagian harta sepencaharian merupakan perkara yang rumit untuk diselesaikan. Kadar pembagian harta sepencaharian menurut Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Kelantan kadar pembagiannya berdasarkan kepada besarnya sumbangan atau dibagi sesuai dengan sumbangannya masing-masing, berlaku di sekitar atau di antara  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{4}$  untuk istri dan  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{2}{3}$  untuk suami sesuai dengan keputusan dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

## DAFTAR ISI

Hal

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH TINGGI SYARIAH**

#### **KOTA BHARU KELANTAN**

A. Sejarah Berdiri dan Latar Belakang Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan.....	13
B. Misi, Visi, Objektif, Fungsi Dan Tujuan Jabatan Kehakiman Syariah Kota Bharu Kelantan.....	18

C. Rincian Tugas Pengadilan Di Mahkamah Tinggi Syariah	
Kota Bharu .....	21

### **BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA SEPENCAHARIAN**

A. Jenis-Jenis Harta Dalam Perkawinan.....	29
B. Konsep Harta Sepencaharian.....	32
C. Dasar Penetapan Harta Sepencaharian.....	37
D. Peruntukan Harta Sepencaharian Menurut Kitab-Kitab Fiqh	
Dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan .....	44

### **BAB IV : PEMBAGIAN HARTA SEPENCAHARIAN SETELAH**

#### **PERCERAIAN DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH KOTA**

#### **BHARU KELANTAN**

A. Putusan Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan Tentang	
Pembagian Harta Sepencaharian Mengikut Enakmen Keluarga	
Islam Kelantan Di Bawah Seksyen 122.....	55
B. Pertimbangan Dan Dasar Putusan Hakim Dalam Penyelesaian	
Kasus Harta Spencaharian Di Mahkamah Tinggi Syariah Kota	
Bharu Kelantan.....	68
C. Analisa Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Tinggi	
Syariah Dalam Hal Pembagian Harta Sepencaharian.....	83

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	92

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu perkongsian hidup, hakikat perkongsian hidup ini terjadi setelah terjalinnya kehidupan suami istri. Pada dasarnya semua orang yang mendirikan rumahtangga ingin hidup aman, bahagia hingga akhirnya. Namun akibat daripada berbagai masalah dan tidak lagi sehaluan antar suami istri, maka terjadi juga perkara yang tidak diinginkan serta paling dibenci oleh Allah, yaitu talak.

Sungguhpun ikatan pernikahan telah putus akibat jatuh talak, Islam masih memberi ruang kepada pasangan suami istri untuk terus berhubung di antara satu sama lain dengan batas-batas pergaulan yang diharuskan oleh hukum syarak selama masa iddah. Ketentuan ini semata-mata untuk memastikan hak-hak mantan suami, mantan isteri dan anak-anak terus dilindungi.

Hak-hak yang dapat dituntut di Mahkamah Syariah setelah sesuatu perceraian terjadi ialah: nafkah iddah, mut'ah, harta sepencaharian, tunggakan nafkah, tunggakan nafkah anak, hak jagaan anak, nafkah anak, dan hak tempat tinggal.

Harta sepencaharian adalah harta yang diperoleh secara usaha sama oleh suami dan istri<sup>1</sup>. Dalam hal ini , apa yang disyaratkan ialah sumbangan masing-masing ketika mendapatkan harta tersebut. Sebelum adanya peruntukan dalam undang undang keluarga Islam di Malaysia, terdapat keadaan berbeda dalam menentukan bagian suami dan bagian istri bagi setiap negeri. Keadaan ini timbul disebabkan pemahaman yang berbeda mengenai konsep harta sepencaharian itu sendiri.

Harta Sepencaharian telah ditakrifkan dalam Enakmen Pentadbiran Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan di mana Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan menjalankan perbicaraan berhubung dengan pembagian atau tuntutan kepada harta sepencaharian.

Tuntutan harta sepencaharian boleh dibuat secara umumnya selepas berlaku penceraian dan kematian. Professor Ahmad Ibrahim menyebutkan dalam bukunya "Islamic Law in Malaysia" yang diterbitkan pada 1965 oleh Malaysian Sociological Research Institute, pada mukasurat 389 menyatakan bahwa harta sepencaharian ialah harta yang diperolehi bersama yang mana kerja yang dilakukan menyebabkan pemilikan bersama; semasa berlaku penceraian atau kematian, istri mempunyai hak terhadap bagian selain daripada penyelesaian perkara yang lain yang diwajibkan di bawah Undang-Undang Islam<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Siti Zalikah Md. Nor, *Harta Sepencarian*, (Kota Bharu: Darulnaim Sdn.Bhd, 2007), hlm 58.

<sup>2</sup> Ahmad Ibrahim, *Islamic Law in Malaysia*, (Kuala Lumpur: Malaysian: Sociological Research Institute, 1965), h.389

Enakmen harta sepencaharian telah diberi pengakuan oleh semua Mahkamah Syariah di Malaysia. Yang penting ialah penyelesaian tuntutan harta sepencaharian akan diselesaikan segera selepas menyempurnakan wasiat dan sebelum dibuat pembagian harta mengikut sistem faraid.

Mengikut aturan dalam Enakmen Pentadbiran Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan, Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan menjalankan perbicaraan berhubung dengan pembagian atau tuntutan kepada harta sepencaharian. Seterusnya Enakmen Keluarga Islam Negeri Kelantan No 6 di bawah seksyen 122 menjelaskan-<sup>3</sup>

1. Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talak atau membuat sesuatu perintah perceraian, memerintah supaya harta sepencaharian yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkawinan dengan usaha bersama-sama mereka dibagi di antara mereka atau supaya mana-mana harta itu dijual dan hasil jualan itu dibagi di antara pihak-pihak itu.
2. Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen kecil (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang-
  - a. Takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk uang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu;
  - b. Apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;
  - c. Keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkawinan itu, jika ada, dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembagian yang sama banyak.
3. Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi dalam masa perkawinan itu dibagi antara mereka atau supaya aset itu dijual dan hasil jualan itu dibagi antara pihak-pihak itu.
4. Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada –

---

<sup>3</sup> Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Kelantan No 6 Tahun 2002, h. 105-106

- a. Takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperoleh aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga;
  - b. Keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkawinan itu, jika ada, dan tertakluk kepada pertimbangan –pertimbangan itu, Mahkamah boleh membagikan aset-aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkan munasabah, tetapi, walau bagaimana pun, pihak yang telah memperoleh aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.
5. Bagi maksud seksyen ini, rujukan-rujukan mengenai aset yang diperoleh dalam masa perkawinan termasuklah aset-aset yang dipunyai oleh satu pihak sebelum perkawinan itu yang telah dimajukan pada sebagian besarnya dalam masa perkawinan itu oleh pihak yang satu lagi itu atau dengan usaha bersama mereka<sup>4</sup>

Enakmen-Enakmen tersebut telah berlaku sejak dari 2002 dan sebelum daripada itu, undang-undang tahun 1919<sup>5</sup>, undang-undang tahun 1953 dan undang-undang 1966<sup>6</sup> Mahkamah Syariah juga diberi kuasa untuk menjalankan perbicaraan berhubung dengan harta sepencaharian.

Cara penyelesaian sengketa harta sepencaharian ialah melalui kaedah sulh yaitu dengan cara berdamai melalui pengakuan atau penyerahan hak pemilikan kepada satu pihak lagi atau nilai harta yang dipersetujui dibagi mengikut persetujuan. Persetujuan ini boleh dibuat di luar mahkamah atau di hadapan pegawai sulh dan kemudian ianya akan ditetapkan sebagai satu perintah oleh mahkamah.

Kaedah lain adalah melalui persetujuan semasa perbicaraan sedang berlangsung. Hakim kebiasaannya akan memberi peluang kepada kedua-dua pihak

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Notis nombor 33 tahun 1919 (*pembahagian harta benda laki bini*) Kelantan

<sup>6</sup> Undang-Undang Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan dan Mahkamah Qadhi Kelantan Tahun 1953

untuk mencapai persetujuan bersama. Maka persetujuan ini akan ditetapkan sebagai satu perintah Mahkamah.

Sekiranya kedua-dua kaedah tersebut tidak dapat menyelesaikan pertikaian, maka mahkamah akan meneliti setiap keterangan dan penghujahan pihak-pihak. Seterusnya mahkamah akan memutuskan pembagian harta sepencaharian tersebut melalui perintah mahkamah <sup>7</sup>.

Menurut statistik kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan pada tahun 2010, tuntutan harta sepencaharian telah dilaporkan sebanyak 57 kasus yang termasuk dalam kasus yang disebabkan kematian, perceraian dan poligami. Adapun kasus tuntutan harta sepencaharian setelah perceraian adalah sebanyak 22 kasus <sup>8</sup>.

Ada juga keputusan dari Mahkamah Tinggi Syariah tidak dipersetujui oleh pihak-pihak yang berperkara. Dengan itu mereka mengemukakan tuntutan mereka ke Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan.

Dalam kasus Rusiah Abd Manaf sebagai penggugat dan Ismail Mohamood sebagai tergugat yang berasal dari Pasir Puteh, Kelantan, mereka telah berkawin pada tahun 1972 dan bercerai pada 21 November 2009 melalui cara tebus talak di Mahkamah Syariah Pasir Puteh dan dikaruniai empat orang cahaya mata. Mahkamah telah memutuskan bahwa harta yang menjadi pertikaian ialah harta sepencaharian hasil daripada sumbangan tidak langsung istri yang menjaga rumah dengan

---

<sup>7</sup> Enakmen Keluarga Islam Negeri Kelantan No 6 Tahun 2002, *op cit.*, h. 108

<sup>8</sup> Catatan statistic dokumen yang diperdapat pada Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu

merawatnya tetapi rumah itu didiami oleh yang tergugat dan istri barunya setelah bercerai dengan penggugat. Mahkamah memerintahkan supaya rumah itu dibagi sama rata antara penggugat dan tergugat <sup>9</sup>.

Dalam kasus Wan Deraman Wan Talib sebagai penggugat dan Siti Fatimah Majid sebagai tergugat, yang kawin pada tahun 1953 dan bercerai pada tahun 1998 dan dikaruniai seramai 6 orang anak, Mahkamah telah memutuskan bahwa harta yang menjadi pertikaian ialah harta sepencaharian hasil daripada sumbangan suami yang membeli lot-lot tanah yang dinamakan kepada nama isteri untuk mengelakkan dari cukai pendapatan. Mahkamah memerintahkan supaya lot-lot tanah itu dibagi sama rata antara penggugat dan tergugat <sup>10</sup>.

Dalam kasus Sarimah Hussin lawan Mohd Dalnia Mokhtar, yang kawin pada tahun 2001 dan bercerai pada tahun 2008 dari Tanah Merah Kelantan, Mahkamah telah memutuskan bahwa pihak tergugat (suami) harus membayar balik hutang modal kepada penggugat (isteri) sebanyak RM43,000,00 secara ansuran bulanan sehingga selesai. Ini adalah kerana mantan isteri telah menyumbangkan modal tersebut kepada mantan suami semasa membuka perniagaan komputer mereka di Tanah Merah, Kelantan <sup>11</sup>.

Dalam kasus Rozyani Zakaria lawan Muhd Zuki Md. Yusoff, yang kawin pada tahun 1988 dan bercerai pada tahun 2007 dari Kota Bharu, Kelantan,

---

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Syariah kasus ( Mal No 03100-105-1046- 2010)

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Syariah kasus ( Mal No 03100-19 -0010- 2010)

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Syariah kasus ( Mal No 03100-154-0762-2010)

Mahkamah telah memutuskan bahwa pihak tergugat (suami) membagi nilai harta mereka yang berupa rumah teres satu tingkat di Kota Bharu yang bernilai RM60.000 dibagikan 50/50. Ini adalah karena sumbangan mantan isteri yang sama-sama mengumpul harta sehingga dapat membeli rumah itu.<sup>12</sup>

## **B. Batasan Masalah**

Masalah tuntutan harta sepencaharian kerap didengar apabila berlaku perceraian suami-istri atau kematian pasangan. Dan kebiasaannya ia melibatkan tuntutan hak-hak istri kepada mantan suami mereka. Namun begitu, terdapat juga mantan-mantan suami yang tidak mahu memberikan harta sepencaharian kepada mantan istri mereka, menyebabkan mantan-mantan isteri mereka membuat tuntutan harta sepencaharian di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan.

## **C. Perumusan Masalah**

Beberapa permasalahan yang timbul akibat kekosongan hukum yang mengatur permasalahan harta sepencaharian secara tegas menyebabkan perlunya diadakan penelitian lebih lanjut. Permasalahan tersebut antar lain adalah:

1. Bagaimanakah putusan Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu tentang pembagian harta sepencaharian di Kota Bharu Kelantan.

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Syariah kasus ( Mal No 03100-154-0752-2010)

2. Apakah pertimbangan dan dasar putusan Hakim dalam penyelesaian kasus harta sepencaharian di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan .
3. Bagaimanakah analisa Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Tinggi Syariah dalam hal pembagian harta sepencaharian.

#### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Beberapa hal yang menjadi tujuan meneliti masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan tentang pembagian harta sepencaharian.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan dalam mengeluarkan putusan dalam Enakmen Keluarga Islam Negeri Kelantan berkenaan pembagian harta sepencaharian.
3. Untuk mengetahui analisa Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Tinggi Syariah dalam hal pembagian harta sepencaharian.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum Islam Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Sebagai sarana perluasan khazanah pengetahuan penyusun dan pembaca.



3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan yang memiliki kewenangan absolut atas daerah-daerah dalam negeri di Malaysia berdasarkan domosili pihak yang berperkara.

### **2. Subjek dan objek penelitian**

Subjek penelitian ini adalah kasus-kasus pembagian harta sepencaharian, dan para Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan.

Objek penelitian adalah pelaksanaan pembagian harta sepencaharian di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan.

### **3. Populasi dan sample**

Populasi dalam penelitian ini adalah kasus-kasus pembagian harta sepencaharian suami istri di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan. Oleh karena jumlah populasi adalah 22 kasus, maka penelitian ini menggunakan sample sebanyak 8 kasus dengan teknik purposive sampling. Ini adalah karena ada kesamaan kasus antar 22 kasus tersebut.

#### 4. Sumber data

Data yang disusun dihasilkan dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Data Primer, yaitu sumber data pokok yang diperoleh dari dokumen lembar putusan dan hasil wawancara yang diajukan kepada para Hakim.
- b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan dan kitab-kitab fiqh sebagai dasar analisa.
- c. Data Terier, yaitu data tambahan yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, berupa ensiklopedia, kamus istilah dan indeks Al-Quran.

#### 5. Metode pengumpulan data

- a. Studi dokumen, yaitu dengan menggali beberapa dokumentasi data bentuk literature yang berhubungan dengan obyek penelitian dengan tujuan utama sebagai bahan penelitian dan pengayaan teori.
- b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### 6. Metode analisa data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisa dengan analisa data kualitatif yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Data kualitatif tersebut kemudian dijelaskan dengan cara menggabungkan satu fakta dengan fakta yang lain kemudian data itu dianalisa untuk selanjutnya ditarik kesimpulannya.

#### 7. Metode penulisan

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data dan keterangan untuk dipaparkan kemudian dianalisa dengan cara menggambarkan pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan banding terhadap perkara dari Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan .

### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan hasil penelitian ini disusun dengan suatu sistem yang diatur sedemikian rupa agar dapat menghasilkan pembahasan yang terarah. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah diawali dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan pada bab pertama.

Kemudian pada bab kedua akan dipaparkan tinjauan umum mengenai lokasi penelitian, sejarah berdiri, Misi, Visi, Objektif, Fungsi dan tujuan Jabatan Kehakiman

Syariah Negeri Kelantan dan Rincian tugas pengadilan di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan.

Dilanjutkan dengan bab ketiga yang berisi tinjauan umum tentang harta sepencaharian yang berisi : Jenis-jenis harta dalam perkawinan, konsep harta sepencaharian, dasar penetapan harta sepencaharian dan Pembagian harta sepencaharian menurut kitab-kitab fiqh dan Undang-undang Enakmen Keluarga Islam Kelantan No 6 seksyen 122 Tahun 2002.

Pada bab keempat merupakan bab analisa yaitu pelaksanaan pembagian harta sepencaharian setelah perceraian yang berisi putusan Hakim, pertimbangan dan dasar putusan Hakim dalam mengeluarkan putusan menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kelantan, dan analisa hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan dalam hal pembagian harta sepencaharian.

Terakhir adalah bab kelima yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH TINGGI SYARIAH KOTA BHARU KELANTAN**

Lokasi penelitian penulis adalah di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan yaitu salah satu naungan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan yang terletak di kabupaten Kota Bharu, propinsi Kelantan, lebih kurang 4 km daripada Bandar Kota Bharu.

#### **A. Sejarah Berdiri Dan Latar Belakang Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan**

Mahkamah Syariah pertama kali didirikan di negeri Kelantan ialah pada tahun 1060 H bersamaan 1650 M. Undang-undang yang diguna pakai pada masa itu ialah undang-undang Islam. Kemuncak perjalanan undang-undang Islam ialah pada zaman pemerintahan Sultan Mohamed yang ke tiga dari tahun 1890-1891 di mana pencuri-pencuri yang didapati bersalah di Mahkamah Syariah yang berada di Kota Bharu pada masa itu dikenakan Hukum Hudud.<sup>1</sup>

Keadaan ini berterusan sehinggalah adanya campurtangan penjajah yang telah memperkenalkan undang-undang mereka ke dalam sistem perundangan yang berlaku pada masa itu dan mengenyepikan undang-undang Islam sedikit demi sedikit melalui enakmen yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang di Mahkamah Syariah sehingga tinggal Undang-undang yang berkaitan dengan keluarga Islam saja. Sebagai

---

<sup>1</sup> Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, *Sejarah Penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan*, (Kota Bharu: Mahkamah Syariah, 1998), halaman 1

contohnya Enakmen tahun 1919 yang membatasi bidang kuasa Mahkamah Syariah yang ada di Kota Bharu pada masa itu .<sup>2</sup>

Latar belakang usaha ke arah mewujudkan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan boleh dilihat pada perkembangan berikut:-

1. Pada 4.12.1972 - Mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam telah bersetuju lembaga yang diketuai oleh Allahyarham Tan Sri Syed Nasir Ismail untuk mengkaji kedudukan Mahkamah Syariah dan taraf Qadi-qadi seluruh Malaysia dengan hasrat untuk memperbaiki dan mempertingkatkan kedudukan Mahkamah Syariah dan taraf Qadi-qadi.
2. Pada 30.4.1983 - Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah menimbang laporan lembaga tersebut dan mengakuinya untuk digunakan oleh negeri-negeri. Laporan tersebut di antara lain menyentuh mengenai:
  - i. Struktur organisasi Mahkamah Syariah, bidangkuasa, prosedur, dan tugas-tugas Qadi.
  - ii. Negeri-negeri wajib mempunyai organisasi Mahkamah Syariah dengan struktur dan Tanggungjawab semata-mata dalam perkara kehakiman.
  - iii. Susunan struktur organisasi Mahkamah hendaklah mempunyai tiga peringkat yaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah.
  - iv. Perlu diwujudkan suatu tugas kehakiman dan perundangan Syariah di tiap-tiap negeri.

---

<sup>2</sup> Notis nombor 33 tahun 1919 (*pembahagian harta benda laki bini*) Kelantan,*loc.cit.*

3. Pada 2 & 3.6.1990 - Jabatan Perkhidmatan Awam dan perbendaharaan Malaysia telah membuat pemeriksaan tugas bagi mewujudkan Mahkamah Syariah Negeri.
4. Pada 9.6.1991 - Masyarakat Jawatankuasa perancang, kewangan dan perjawatan telah membuat keputusan bersetuju dengan cadangan ini.
5. Pada 3.11.1991 - Majlis Mesyuarat Negeri telah membincang kertas MMK Bil.22/862/91(25) dan bersetuju jawatan-jawatan berkenaan diluluskan tetapi pengisian jawatan-jawatan tersebut bergantung kepada kemampuan kewangan dan hendaklah mendapat kelulusan Majlis Mesyuarat Kerajaan terlebih dahulu
6. Pada 16.1.1995 & 12.8.1995 - Keputusan ini telah dimaklumkan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk pertimbangan dan perakuan kepada Perbendaharaan Malaysia bagi kelulusan tugas mengikut perkara 112 Perlembagaan Persekutuan.
7. Pada 2.5.1996 - Masyuarat Jawatankuasa Khas untuk mengkaji tugas-tugas Tingkatan Tertinggi (JKTT) telah bersetuju dengan cadangan pelaksanaan sepenuhnya pengasingan tugas Mahkamah Syariah Negeri Kelantan dan pewujudan jawatan-jawatan Ketua Hakim Syariah, Hakim Mahkamah Tinggi/Rendah Syariah dan Jawatan-jawatan sokongan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan
8. Pada 17.7.1996 - Perbendaharaan Malaysia telah mengeluarkan kelulusan tugas Bil 67 tahun 1996 yang berkuatkuasa mulai 15 hb Juli 1996 mengenai perjawatan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Bahagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, *op. cit.*, h.3.

Mulai pada Juli 1998 telah didirikan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan untuk menggantikan Mahkamah Qadi yang terdiri daripada:

1. Mahkamah Rayuan Negeri yang bertempat di Kota Bharu dan diketuai oleh Y.A.A. Ketua Hakim Syarie.
2. Mahkamah Tinggi Syariah yang diketuai oleh Y.A.A. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah .
3. Mahkamah Rendah Syariah yang diketuai oleh Y.A. Hakim Mahkamah Rendah Syariah.

Mahkamah Syariah Negeri telah diletak di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan bertujuan untuk memberi sepenuh penumpuan dan perhatian dalam bidang Kehakiman Syariah, serta pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang dan kaedah-kaedah yang berkaitan yaitu:- <sup>4</sup>

- a. Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah No.3 Tahun 1982
- b. Enakmen Kanun Jenayah Syariah No.2 Tahun 1985
- c. Enakmen acara jenayah Syariah No.9 Tahun 1983
- d. Enakmen Acara Sivil No.5 Tahun 1984
- e. Enakmen Keluarga Islam No.1 Tahun 1984
- f. Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah No.1 Tahun 1991
- g. Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan No.4 Tahun 1994 dan Hukum Syarak (berhubung dengan kesalahan-kesalahan)
- h. Kaedah hukuman sebat 1987

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,h.4



i. Kaedah Peguam Syarie 2000

Selain itu, beberapa nama jawatan turut berubah di mana Ketua Hakim Syarie selaku Ketua Jabatan telah menggantikan Qadi Besar Kelantan dan jawatan ini telah dihapuskan. Begitu juga dengan jawatan Timbalan Qadi Besar Turut dihapuskan dan diganti dengan jawatan baru yaitu 2 orang Hakim Mahkamah Tinggi Syariah diwujudkan. Hakim Mahkamah Rendah Syariah telah diwujudkan dengan menggabungkan 2 buah Mahkamah Qadi Khas dan jajahan-jajahan yang ditadbir oleh seorang Hakim Mahkamah Rendah Syariah.

Pada masa ini ketua Hakim Syarie adalah Y.A.A. YB Dato' Hj. Daud bin Muhammad, 2 orang Hakim Mahkamah Tinggi adalah Y.A.A. Hj. Abdullah bin Man dan Y.A.A. Abu Bakar bin Abdullah Kutty. Manakala pada setiap Jajahan di negeri Kelantan terdapat Mahkamah Rendah Syariah yang menguruskan tentang masalah dalam Enakmen Keluarga Islam untuk masyarakat di jajahannya . Penempatan Hakim-hakim Mahkamah Rendah Syariah jajahan adalah seperti berikut:-

1. Jajahan Kota Bharu - 1 Orang yaitu Y.A. Nik Najib b. Che Hassan
2. Jajahan Gua Musang - 1 Orang yaitu Y.A. Norazizi b. Abd. Rahman
3. Jajahan Tanah Merah - 1 Orang yaitu Y.A. Aris Fadzilah b. Sulaiman
4. Jajahan Pasir Puteh - 1 Orang yaitu Y.A. Norhasneey Ridhwan b. Hassan
5. Jajahan Kuala Krai - 1 Orang yaitu Y.A. Mohd Surbaineey b. Husain
6. Jajahan Pasir Mas - 1 Orang yaitu Y.A. Mohd Hadiz b. Daud
7. Jajahan Jeli - 1 Orang yaitu Y.A. Azhari b. Mohd Yusoff
8. Jajahan Bachok - 1 Orang yaitu Y.A. Mohd Nabil b. Mohd Shukri
9. Jajahan Machang - 1 Orang yaitu Y.A. Fairul Azam b. Ismail

10. Jajahan Tumpat - 1 Orang yaitu Y.A. Mazlan B. Abdullah<sup>5</sup>

## **B. Misi, Visi, Objektif, Fungsi Dan Tujuan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan**

Adapun Misi Mahkamah Syariah Negeri Kelantan adalah untuk mengutamakan perundangan Islam sebenar di Negeri Kelantan secara lebih telus, adil dan bersistematik terutama di dalam pengendalian kasus-kasus rayuan secara berkesan.<sup>6</sup>

Visi Mahkamah Syariah Negeri Kelantan adalah untuk menjadikan sebuah agensi negeri yang adil dan berwibawa dalam melaksanakan sistem perundangan Islam yang lengkap berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qias demi menegakkan keadilan.<sup>7</sup>

Adapun objektif Mahkamah Syariah Negeri Kelantan adalah:

1. Pada prinsipnya tujuan pendirian Mahkamah Syariah adalah sama dengan tujuan pendirian Mahkamah Awam yaitu untuk menegakkan keadilan dan menghukum pesalah-pesalah supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bermoral serta memulangkan hak kepada yang berhak.
2. Di samping itu tujuan Mahkamah Syariah juga menjalankan perkhidmatan pengadilan mengikut Undang-undang Islam serta adil, cakap dan berkesan.
3. Selain itu tujuannya di peringkat Negeri Kelantan untuk menjadikan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan satu badan atau agensi yang dapat melaksanakan berlakunya Hukum Syarak ke atas seluruh umat Islam dalam negeri Kelantan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Jabatan Kehakiman Negeri Kelantan, *Pengenalan ringkas Jabatan Kehakiman Negeri Kelantan*, (kota Bharu: Mahkamah Syariah Kota Bharu, 1992), h. 6

<sup>7</sup> *Ibid.*

khususnya mengikut perundangan Islam yang lengkap berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qias.<sup>8</sup>

Fungsi Mahkamah Syariah Negeri Kelantan adalah:

1. Melaksanakan Undang-undang Islam mengikut bidangkuasa yang diperuntukkan kepadanya.
2. Mewujudkan sistem pentadbiran kehakiman Islam yang teratur dan berkesan.
3. Menerima, mendengar, dan menyelesaikan kasus-kasus yang di bawa ke Mahkamah Syariah dengan adil dan saksama mengikut peruntukan Undang-undang yang berkuatkuasa<sup>9</sup>

Begitu juga dengan tujuan dan peranan Mahkamah Syariah Kelantan adalah:

1. Mengekalkan perundangan Islam yang diperuntukan kepada Mahkamah ini bagi menjamin setiap Muslim patuh dan tidak melanggar perintah Allah s.w.t. berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah.
2. Menjalankan pentadbiran agama Islam al-Quran dan as-Sunnah bagi menjamin kesejahteraan orang Islam.
3. Melahirkan keluarga Islam yang berpegang teguh pada ajaran Islam serta mengawasi mereka supaya menjalani kehidupan mengikut syariat Islam.
4. Menyelamatkan umat Islam daripada keruntuhan rumahtangga.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

5. Tempat rujukan untuk mendapatkan khidmat nasihat serta menyelesaikan masalah rumahtangga.
6. Memberi bimbingan dan nasihat konseling kepada pasangan yang ingin berumahtangga agar dapat membina rumahtangga yang bahagia sebagaimana tuntutan agama.
7. Tempat membuat rayuan daripada pihak istri untuk mendapatkan nafkah daripada suaminya yang sudah bercerai.
8. Tempat menyelesaikan masalah kekeluargaan seperti nikah kawin, perceraian, talak, fasakh, dan sebagainya.
9. Menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat seperti judi, minim arak, riba, khalwat, dan lain-lain perkara mungkar.
10. Membantu serta menyelesaikan pembagian harta pusaka dan hal-hal berkaitan seperti wasiat.
11. Juga bertugas sebagai penasihat jika diminta oleh kerajaan.
12. Badan yang dilantik oleh kerajaan yang bertanggungjawab memberi penerangan berkait dengan keagamaan, kekeluargaan, dan sentiasa berdakwah sepanjang masa.
13. Menerapkan nilai-nilai Islam agar orang Islam mengamalkan sistem dan cara hidup Islam secara menyeluruh dalam kehidupan mereka<sup>10</sup>

### **C. Rincian Tugas Pengadilan Di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu**

---

<sup>10</sup> Government of Kelantan Gazette, *Warta Kerajaan Negeri Kelantan*, (Kota Bharu:Pustaka Aman Press 2004), h.345

Cara pelaksanaan di Mahkamah Syariah ada tiga cara yaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah. Adapun Mahkamah Rendah Syariah. Pelaksanaannya adalah:

1. Membicarakan kasus-kasus yang diperuntukan oleh enakmen negeri.
2. Mendengar dan memutuskan kasus-kasus tersebut.
3. Menyediakan kertas-kertas keputusan dan laporan Mahkamah.
4. Membicarakan kasus-kasus di peringkat daerah.<sup>11</sup>

Adapun Mahkamah Tinggi Syariah, cara pelaksanaannya adalah:

1. Membicarakan kasus-kasus yang diperuntukan oleh enakmen negeri kepadanya
2. Mengeluarkan perintah kasus-kasus sivil dan jenayah
3. Menyelesaikan dan mengesahkan kasus-kasus
4. Menguruskan kasus-kasus rayuan.
5. Menyediakan jurnal Mahkamah untuk diterbitkan (bagi sesetengah negeri).<sup>12</sup>

Dan Mahkamah Rayuan Syariah (Banding), pelaksanaannya adalah:

1. Bertugas untuk mendengar kasus-kasus rayuan (banding)
2. Mempunyai kuasa pembatalan mana-mana sabitan hukuman oleh mahkamah Syariah.
3. Mengurangkan hukuman
4. Menerima supaya diadakan pembicaraan semula atau ulang bicara

---

<sup>11</sup> Bahagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, op.cit., h.7

<sup>12</sup> *Ibid.*

5. Menerima rayuan tertuduh yang dihukum penjara atau sanksi tidak kurang RM25.00 dan telah membuat rayuan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.
6. Setiap rayuan akan didengar sekurang-kurangnya oleh tiga orang panel (hakim) rayuan daripada panel (hakim) Rayuan Syariah yang dilantik dan ditauliah oleh KDYMM sultan (Ketua Hakim adalah Pengerusi Panel Rayuan Syariah). Keputusan Mahkamah adalah muktamat dan sah.<sup>13</sup>

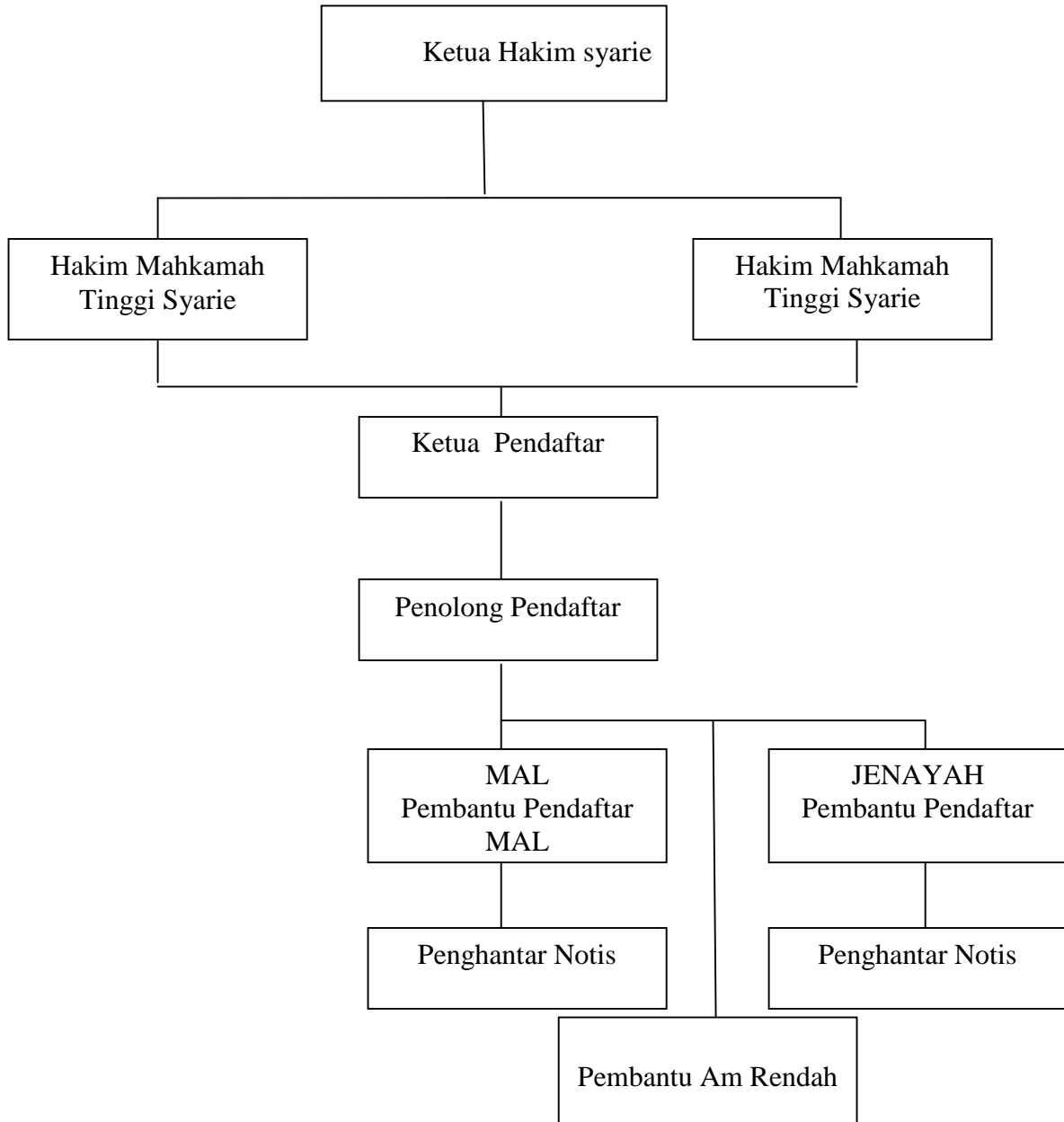
Permulaan berlaku suatu Enakmen bagi meminda dan menyatukan peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam mengenai perkawinan, perceraian, nafkah, penjaga, dan perkara-perkara lain berkaitan dengan kehidupan keluarga. Enakmen ini bolehlah dinamakan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 2002 Enakmen ini hendaklah mula berlaku pada tarikh yang telah ditetapkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan melalui pemberitahuan dalam warta, Enakmen ini terpakai bagi semua orang Islam yang tinggal dalam negeri Kelantan Darul Naim dan bagi semua orang Islam yang bermastautin dalam negeri Kelantan Darul Naim tetapi tinggal di luar Negeri itu.<sup>14</sup>

### **Carta Organisasi Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Kelantan**

---

<sup>13</sup> Government of Kelantan Gazette, *Op.cit.*, h.404

<sup>14</sup> Jabatan Kehakiman Negeri Kelantan, *op.cit.*,h. 26



Adapun keterangan dari carta organisasi tersebut dinyatakan bahwa Ketua Hakim Syarie adalah berkedudukan yang paling tinggi di dalam organisasi Mahkamah Tinggi

Syariah Kota Bharu. Ketua Hakim Syarie bertugas di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan dan ditugaskan sebagai mendengar dan membicarakan kasus serta berbidang kuasa mendengar rayuan atau semakan kasus-kasus dari Mahkamah Rendah Syariah daerah-daerah yang ada di Kelantan ini.<sup>15</sup>

Adapun tugas Hakim Mahkamah Tinggi Syarie adalah mendengar, berbicara, dan memutuskan kasus Mahkamah Tinggi Syariah, dalam pada itu juga beliau mengendalikan sebutan dan perbicaraan kasus-kasus jenayah syariah dalam bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah, membuat pengiraan dan pembagian harta pesaka orang-orang Islam, menyediakan alasan penghakiman, menandatangani saman/notis/permohonan perintah/ waran(surat) / bon/ sapina(keterangan) dan lain-lain dokumen, mendengar ikrar, wakalah dan menandatangani affidavit, mengawasi dan bertanggungjawab ke atas karyawan dalam menjalankan tugas selaku ketua pejabat, mengawal selia urusan kewangan pejabat, dan lain-lain berkaitan, dan lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.<sup>16</sup>

Bagi Penolong pendaftar pula, tugas yang dijalankan adalah bertanggungjawab dalam penerimaan dan penyemakan segala tuntutan dan permohonan kasus di Mahkamah Tinggi Syariah dan menentukan tarikh sebutan, bertanggungjawab dalam urusan pendaftaran semua kasus Jenayah di Mahkamah Tinggi Syariah dan menentukan tarikh sebutan kasus, bertanggungjawab dalam penerimaan pendaftaran semua kasus faraid di Mahkamah , bertanggungjawab dalam urusan penyeliaan rekod rayuan kasus-kasus Mahkamah Tinggi Syariah, bertanggungjawab dalam urusan rekod-rekod Mahkamah,

---

<sup>15</sup> Jabatan Kehakiman Negeri Kelantan, *op.cit.*,h. 26

<sup>16</sup> *Ibid.* h.27



menyediakan laporan bulanan dan tahunan, menyemak segala keputusan (draf perintah) yang telah diputuskan oleh Hakim, menguruskan pengendorsan saman, waran dan perintah, dan lain-lain tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan.<sup>17</sup>

Adapun tugas Pembantu Pendaftar bagian pentadbiran kehakiman adalah menerima permohonan pendaftaran kasus Mal Mahkamah Tinggi Syariah, menerima permohonan Pendaftaran Kasus Jenayah Mahkamah Tinggi, menerima permohonan pendaftaran faraid, menguruskan persiapan sebutan/ perbicaraan dalam Dewan Mahkamah dan Kamar Hakim, membantu Hakim dalam melaksanakan prosiding kehakiman ketika sebutan/ perbicaraan di dalam Dewan Mahkamah dan Kamar Hakim, menguruskan surat-menyurat berkaitan kasus seperti notis tangguhan, sapina saksi(keterangan), waran(surat) tangkap, bon jamin, waran(surat) penjara, surat kepada Pengacara Syarie, Pendakwa Syarie, pihak-pihak dan lain-lain, menguruskan dan melaksanakan Draf dan perintah yang telah diputuskan oleh Hakim, mengemaskini data dalam Mahkamah Syariah dan lain-lain tugas dari semasa ke semasa.<sup>18</sup>

Sementara itu, tugas Pembantu Am Rendah dibagian Pentadbiran / kewangan adalah:

1. Bertanggungjawab mengagihkan Koran kepada semua pegawai-pegawai berkenaan.
2. Bertanggungjawab stempel surat dan merekod surat-surat rasmi keluar/ masuk.
3. Bertanggungjawab mengagihkan surat atau dokumen untuk diserahkan kepada pegawai yang berkaitan.

---

<sup>17</sup> *Ibid.* h.28

<sup>18</sup> *Ibid.* h.29

4. Bertanggungjawab memastikan mesin fotocopy dalam keadaan baik untuk digunakan.
5. Bertanggungjawab memastikan bilik menyimpan fail-fail(berkas-berkas) berkaitan kasus dan fail pentadbiran direkod keluar / masuk dalam keadaan baik dan sempurna.
6. Bertanggungjawab membantu urusetia dalam penyediaan keperluan mesyuarat / seminar / bengkel yang dianjurkan di luar jabatan.
7. Bertanggungjawab memastikan surat-surat yang hendak dipos dihantar dengan segera, dan surat yang dihantar dengan serahan tangan ke pejabat yang berdekatan.
8. Lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.<sup>19</sup>

Adapun bagi penghantar notis pula adalah menguruskan surat-menyurat berkaitan kasus seperti notis tangguhan, sapina (keterangan) saksi, waran(surat) tangkap, bon jamin, waran penjara, surat kepada Peguam Syarie, Pendakwa Syarie, pihak-pihak dan lain-lain, menguruskan dan melaksanakan draf dan Perintah yang telah diputuskan oleh Hakim, mengemaskini data dalam Mahkamah Syariah, Lain-lain tugas dari semasa ke semasa.<sup>20</sup>

Demikianlah serba ringkas keterangan tugas-tugas para karyawan yang bekerja di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu.

---

<sup>19</sup> *Ibid.* h.30

<sup>20</sup> *Ibid.* h.31



## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA SEPENCAHARIAN**

#### **A. Jenis-Jenis Harta Dalam Perkawinan**

Menurut Undang-undang keluarga Islam Kelantan, terdapat tiga jenis pemilikan ke atas harta setelah berlakunya perkawinan. Jenis pemilikan tersebut yaitu harta persendirian, harta sepencaharian, dan harta timbal balik.<sup>1</sup> Harta persendirian dan harta timbal balik merupakan harta masing-masing suami istri dan menjadi hak masing-masing. Adapun harta sepencaharian merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan yaitu merujuk kepada harta yang diperoleh bersama suami istri ketika perkawinan berlaku menurut syarat yang ditentukan hukum syarak.<sup>2</sup>

Harta benda dalam perkawinan yang boleh dibagikan antar suami istri adalah harta sepencaharian tidak termasuk harta pribadi suami istri, karena harta pribadi tidak termasuk dalam klasifikasi harta sepencaharian. Harta bersama antar suami istri dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus karena kematian, perceraian, dan dari keputusan Pengadilan. Pembagian harta sepencaharian diputuskan oleh Mahkamah berdasarkan kepada Enakmen 122 ayat (2):

Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang:-

---

<sup>1</sup> Siti Zalikah Md. Nor, *Harta Sepencaharian*, (Kota Bharu: Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan, 2007), Cet. Ke-1, h. 51.

<sup>2</sup> Ab.Kadir Hj.muhammad,Jurnal Syariah, *Harta sepencarian:konsep dan pelaksanaanya di Malaysia*, (Kuala Lumpur: ummah media sdn bhd,1996), cet. Ke 1, jilik 4, h. 101.

- a. Takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk uang, harta, atau kerja bagi memperoleh aset-aset itu.<sup>3</sup>

## 1. Harta persendirian ( pribadi )

Harta persendirian adalah hak ke atas harta yang diperoleh secara pribadi. Artinya harta tersebut diperoleh bukan dari usaha sama atau melalui usaha mereka masing-masing sebelum perkawinan. Harta yang diperoleh dari wasiat, dari pemberian, hadiah, hibah, dan harta yang dipusakakan pemberian tertentu diperoleh sebelum atau selama perkawinan berlangsung, harta jenis ini tetap dikuasai dan di bawah penguasaan masing-masing.

- a. Harta bawaan ketika bujang atau gadis yaitu harta bawaan ialah harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing, harta jenis ini adalah hak dan dikuasai oleh masing-masing pihak suami maupun istri.
- b. Harta dari warisan yaitu harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau selama perkawinan dari warisan orang tua mereka atau keluarga terdekat.
- c. Harta dari hadiah, hibah atau pemberian tertentu yaitu harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan suami maupun istri setelah terjadinya ikatan perkawinan.<sup>4</sup>

## 2. Harta Sepencaharian

---

<sup>3</sup> Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan No 6 Tahun 2002, *Lot. cit.*

<sup>4</sup> Ab.Kadir Hj.muhammad, *op.cit.*,h. 52

Harta sepencaharian adalah harta yang diperoleh secara usaha sama oleh suami istri. Dalam hal ini, apa yang disyaratkan ialah sumbangan masing-masing ketika mendapatkan harta tersebut.<sup>5</sup> Menurut Seksyen 122, kuasa Mahkamah memerintahkan pembagian harta sepencaharian:

1. Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkawinan dengan usaha bersama mereka dibagi antar mereka atau supaya mana-mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkawinan dengan usaha bersama mereka dibagi antar mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibagi antar pihak-pihak itu.
2. Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen kecil (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang-
  - a. Takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk uang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu;
  - b. Apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;
  - c. Keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkawinan itu, jika ada, dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembagian yang sama banyak.<sup>6</sup>

### 3. Harta Timbal Balik

Harta timbal balik adalah hak suami untuk memiliki bagian tertentu harta istri. Sebaliknya, istri juga mempunyai hak untuk memiliki bagian tertentu harta suami. Hak tersebut merupakan suatu ketentuan syarak, yaitu hak pusaka-mempusakai antar suami istri setelah berlaku kematian salah satu pihak selama mana kedua-duanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah atau dalam iddah raj`iy. Pembagian harta pusaka berlangsung menurut ketentuan hukum syarak.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 53

<sup>6</sup> Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan No 6 Tahun 2002, *Lot. cit.*

Jika Istri meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, maka suami hanya berhak mendapat 1/2 daripada harta peninggalannya. Akan tetapi jika istri mempunyai anak, maka suami hanya mendapat 1/4 daripada harta tersebut. Sebaliknya, jika suami yang meninggal dunia tanpa mempunyai anak, maka istri berhak menerima 1/2 daripada harta peninggalannya. Sebaliknya jika dia mempunyai anak, maka istri cuma mendapat 1/4 daripada harta tersebut.<sup>7</sup>

## **B. Konsep Harta Sepencaharian**

Harta sepencaharian ialah harta yang diperolehi secara bersama-sama oleh suami istri sepanjang perkawinan yang sah di mana kedua-dua pihak memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung terhadap perolehan atau pemilikan harta tersebut.<sup>8</sup>

Harta sepencaharian biasanya didefinisikan sebagai pendapatan atau harta yang didapati daripada usaha bersama antara suami dan istri termasuk pendapatan yang didapati daripada modal antara suami dan istri.<sup>9</sup> Konsep pembagian harta sepencaharian dilakukan oleh masyarakat Melayu sejak dari zaman dahulu lagi karena ia adalah sebagian daripada adat masyarakat Melayu dan hukum harta tidak bercanggah dengan ajaran Islam.

Syariat Islam mengakui harta yang dimiliki oleh individu; termasuk harta yang dimiliki oleh suami atau istri. Akad perkawinan tidak membenarkan suami untuk

---

<sup>7</sup> Ab.Kadir Hj.muhammad, *op.cit.*,h. 55

<sup>8</sup> Jurnal Laporan Syariah, *The Malaysian Current Law Journal*, ( Kuala Lumpur: ICLJ (Sya),2008), h. 124

<sup>9</sup> Azlina bt Abd Latif, *Harta Sepencarian: Perlaksanaan Dan Penilaian Menurut Hukum Syarak*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2004), h.14.

memiliki harta yang dimiliki oleh wanita. Oleh itu, harta yang dikumpulkan oleh wanita bersama dengan suaminya sepanjang tempoh perkawinan adalah harta yang dikongsi oleh mereka berdua serta perlu dibagikan berdasarkan pada persentase sumbangan masing-masing dalam memperoleh harta itu.

Konsep harta sepencaharian ini diluaskan sehingga merangkumi harta yang diperoleh oleh suami selepas perkawinan walaupun istri tidak mempunyai sumbangan langsung dalam usaha memperoleh harta itu.<sup>10</sup> Ini bermaksud istri berhak mendapat harta sepencaharian walaupun tidak bekerja atau sebagai suri rumah. Pihak istri dianggap menyumbang secara tidak langsung pada suami karena mewujudkan ketenangan dan kedamaian pada suaminya sehingga suaminya itu Berjaya.<sup>11</sup> Menurut penulis, konsep harta sepencaharian sebegini mempunyai beberapa kemusykilan berdasarkan pada hujah-hujah yang dikemukakan untuk menyokongnya.

Menurut Enakmen Keluarga Islam Kelantan harta sepencaharian adalah harta yang diperolehi bersama oleh suami istri semasa perkawinan berlaku menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Syarak. Adapun Hukum Syarak, menurut Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Kelantan berarti hukum syarak yang berpandukan kepada Mazhab Syafie atau salah satu Mazhab Maliki, Hanafi atau Hambali.<sup>12</sup>

Harta sepencaharian adalah harta sama ada harta bergerak atau tidak bergerak diperoleh bersama ketika dalam perkawinan yang sah, baik secara langsung atau tidak

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 25

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 16

<sup>12</sup> Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Kelantan No 6 Tahun 2002, *op.cit.*,h.44



langsung dengan berlandaskan kepada hukum syarak, maka ia adalah harta sepencaharian.<sup>13</sup>

Harta sepencaharian adalah merujuk kepada harta diperoleh bersama oleh suami istri ketika perkawinan berlaku menurut syarat yang ditentukan hukum syarak. Harta sepencaharian ini berperanan memastikan suami istri mendapat hak masing-masing hasil daripada sumbangan mereka dalam rumahtangga selain memastikan kehidupan lebih sempurna dapat dicapai terutama dalam keadaan istri diceraikan suami. Ia merupakan penghargaan suami terhadap istri atas pertisipasi yang diberikan istri dalam masa perkawinan mereka.<sup>14</sup>

Pada dasarnya, konsep harta sepencaharian tidak dibincangkan secara khusus oleh para ulama'. Malah tidak ada satupun dalil nash yang jelas berkaitan dengannya. Namun para ulama' telah memberi berbagai pandangan dalam membicarakan tentang harta sepencaharian. Ada yang menyebut ia sebagai "Mata' al-Bayt" yaitu peralatan rumahtangga dan ada yang menyebut sebagai "mal al-Zawjayn" yang berarti hanya suami istri.<sup>15</sup>

Pada dasarnya, harta sepencaharian tidak dapat dianggap sebagai satu aqad perkongsian (al-Syarikah). Ini karena harta sepencaharian dijalankan melalui perkongsian hasil suami istri. Walaupun ketika aqad nikah wujud satu bentuk aqad, namun ia tidak dapat dianggap aqad bagi kotrak secara langsung menimbulkan harta sepencaharian. Ini

---

<sup>13</sup> Md. Akhir Hj yaacob, Siti Zalikah md. Noor, *beberapa aspek Mengenai Enakmen Keluarga Islam di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Al-Rahmaniah Badan Dakwah dan Kebajikan Islam Malaysia, 1989), cet. Ke-1, h. 75

<sup>14</sup> Ab. Kadir Hj. muhammad, *Loc. cit.*

<sup>15</sup> Jurnal Laporan syariah, *op.cit.* h. 133

karena ijab dan qabul tersebut hanyalah bertujuan menghalalkan satu pergaulan antara suami dan istri.

Al-Quran maupun Sunnah tidak menerangkan dalil khusus yang menerangkan kedudukan harta sepencaharian dalam Islam. Namun, dalam surat an-Nisa' ayat 32 menerangkan bahwa setiap lelaki dan wanita mempunyai bagiannya terhadap apa yang mereka usahakan. Allah berfirman:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya:

*“Bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan”.* (A Nisa' 4:32)<sup>16</sup>

Dalam perundangan Islam, apabila sesuatu adat atau uruf diakui kabaikannya dan diberi kekuatan melalui undang-undang, maka ia bertukar menjadi suatu peraturan yang harus diikuti. Sejarah perundangan menunjukkan bahwa Rasulullah s.a.w apabila berhadapan dengan persoalan uruf, baginda mengambil sikap berbeda-beda antara satu adat dengan adat yang lain maupun menerima adat atau menolaknya atau menerima dengan mengubah terhadap sesuatu adat itu sebelum ia menjadi suatu hukum. Menurut Ibn hujaim dan al-Sayuti dalam kitabnya *al Asybah wa al-nazir* sebagaimana dikutip oleh Mohamed Zulhairul bin Abd. Rahman menyatakan bahwa “adat resam sesuatu bangsa

---

<sup>16</sup> Sheikh Abdullah Basmeih, *Al-Quran Al-Karim Mushaf tajwid dan Terjemahan dalam bahas Malaysia*, (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 1999), h.83

atau kaum yang tidak bertentangan dengan Islam adalah boleh diterima sebagai sebagian dari peraturan hidup dan perundangan bagi sebuah negara.

Meskipun harta sepencaharian tidak dijelaskan oleh dalil-dalil nash, namun ulama' masih mengakuinya berdasarkan perkara ini dalam kaedah fiqh Islam seperti al-Adatul Muhakkamah yang adat mengambil tempat hukum dan Al Makruh Bi Al-Urf ka Al-Makruh bi Al-Nas yang berarti sesuatu yang diterima megikut adat samalah kedudukannya seperti dibuat mengikut nash.<sup>17</sup>

Dapat dijelaskan di sini bahwa konsep harta sepencaharian adalah harta yang diperoleh bersama semasa dalam perkawinan yang sah, melalui usaha secara langsung atau tidak langsung dengan berlandaskan kepada hukum syarak. Maka ia adalah harta sepencaharian.

### **C. Dasar Penetapan Harta Sepencaharian**

#### **1. `Urf<sup>18</sup>**

Pembagian harta sepencaharian sebegini dikatakan tradisi atau adat orang Melayu terdahulu secara turun-temurun. Kebanyakan fuqaha kalangan orang Melayu bersandarkan pada hujah “al-Adah Muhakkamah” dalam memberikan otoriti pada amalan pembagian itu. Autoriti adat dalam perundangan Islam memang tidak dapat dinafikan dan ia disepakati oleh majoritas usuliyyun. Hanya saja tahap peraturan hidup dan perundangan bagi sebuah negara.

Apabila dilihat dari sudut syarak untuk mempraktikkan adat sebagai dalil syarak, terdapat beberapa kemusykilan yang timbul berkaitan dengan harta sepencaharian yang

---

<sup>17</sup> Ab.Kadir Hj.muhammad, Abd.Kadir Hj. Muhammad, *op.cit.*, h. 35

<sup>18</sup> Perkara yang biasa dialami oleh manusia, konsisten padanya melibatkan setiap perbuatan dan tutur kata

berasaskan pada sumbangan tidak langsung istri. Antara syarat untuk mempraktikkan adat sebagai dalil syarak adalah adat itu perlu konsisten;<sup>19</sup> praktiknya dalam komuniti, negeri atau negara berterusan dan adalah perkara yang biasa serta diketahui umum. Realiti yang berlaku berkaitan harta sepencaharian adalah sebaliknya. Ini kerana sebagian besar rakyat Malaysia tidak mengetahui tentang harta sepencaharian dan tidak konsisten mengamalkannya. Bahkan ia hanya diketahui oleh sekelompok masyarakat kampung. Itu pun apabila ada yang memohon pada mahkamah untuk menuntut harta sepencaharian. Sememangnya ia adalah adat tetapi adat yang terpencil, tidak konsisten dan tidak diketahui umum. Sumbangan tidak langsung istri pada kejayaan suami untuk memperoleh harta adalah adat masyarakat Islam sejak dari zaman Rasulullah s.a.w. lagi. Namun begitu, persoalan harta sepencaharian tidak langsung ditimbulkan oleh umat Islam. Ini adalah bukti konsep harta sepencaharian yang berasaskan pada sumbangan tidak langsung isteri adalah adat yang tidak dapat diakui.

Antara syarat lain untuk mempraktikkan adat yang wujud selepas syariat disempurnakan adalah adat itu tidak boleh bertentangan dengan nash. Terdapat beberapa kemusykilan berkaitan hal ini. Ia berkaitan dengan definisi harta sepencaharian Negeri Kelantan. Seksyen 122 Enakmen Undang-undang keluarga Islam Kelantan 2002 mentafsirkan harta sepencaharian sebagai berikut:

“Harta sepencaharian” ertinya harta yang diperoleh bersama oleh suami istri, sama ada secara langsung atau tidak langsung, semasa perkawinan berlaku mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Jalal al-Din `Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah 1998), h.201.

<sup>20</sup> Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan No 6 Tahun 2002, *loc. cit.*

Usaha secara langsung untuk memperoleh harta memang tidak dapat dinafikan, manakala usaha secara tidak langsung perlu dibincangkan kembali dan diperhalusi supaya selaras dengan kehendak syarak. Ada yang beranggapan, istri yang bekerja di luar rumah dan membantu suami meringankan bebanan suami serta istri yang menjadi suri rumah yang secara tidak langsung meringankan bebanan suami dengan memasak, membasuh dan sebagainya berhak untuk menuntut harta sepencaharian. Hakikatnya hujah ini berasaskan pada akal yang logik.

Akal dapat dijadikan sandaran hukum apabila tidak dapat diketemukan dalil-dalil yang disepakati. Ini adalah pandangan Syiah. Akal dapat dijadikan unsur penyokong pada dalil-dalil tetapi ia tidak dapat bertindak sendirian. Ini adalah pendapat Ahli Sunnah.<sup>21</sup>

Banyak persoalan timbul akibat daripada frasa “tidak langsung”. Adakah perkawinan dianggap satu kontrak yang menghalalkan istri atau suami untuk menuntut harta satu sama lain? Perkawinan adalah satu akad yang menghalalkan perhubungan suami istri bukan suatu akad yang membolehkan suami istri mengambil harta satu sama lain melainkan sekadar yang wajib sahaja. Contohnya istri boleh mengambil harta suami apabila suami tidak memberi nafkah. Itu pun sekadar yang dapat memenuhi keperluan lazim istri. Apabila kadar yang diambil melebihi had, ia dikategorikan sebagai memakan harta orang lain secara batil sebagaimana dalam ayat 188 Surah Al-Baqarah:

(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

(

Maksudnya:

---

<sup>21</sup> Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan No 6 Tahun 2002, *loc. cit.*

*“Dan janganlah kamu memakan harta antara kamu dengan cara yang batil dengan cara memajukannya pada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian harta manusia dengan cara yang salah sedangkan kamu mengetahui”.*

Segala perbuatan kebajikan yang dilakukan oleh suami atau istri adalah perbuatan yang tidak dapat dinilai dengan uang. Ia adalah pergaulan dan interaksi antara suami istri yang dituntut. Si suami menyediakan nafkah zahir dan batin manakala si istri membantu mengurus rumah tangga. Secara tidak langsung juga, suami menyumbang pada keharmonian dan kedamaian kehidupan istri dengan membantu istri menguruskan kehidupannya. Sama-sama saling membantu dalam kehidupan berumah tangga. Tiada balasan melainkan pahala dan rahmat Allah sebagaimana dalam ayat 71 surah al-Taubah:

*(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)*

Maksudnya:

*“Dan orang-orang mukmin lelaki serta orang-orang mukmin wanita sebagiannya menjadi penolong sebagian yang lain, mereka menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran”. Hakikatnya, suami atau istri mempunyai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan supaya kehidupan masing-masing sentiasa berada dalam keredhaan Allah tanpa menzalimi mana-mana pihak sama ada suami atau istri.*

Realiti hari ini menuntut supaya kebanyakan suami dan istri saling bergabung tenaga untuk mencari rezeki yang halal untuk memenuhi perbelanjaan keperluan keluarga. Walaupun kewajipan mencari nafkah keluarga adalah tugas asal suami, namun realiti menuntut supaya pihak istri juga turut menyumbang tenaga mencari pendapatan. Memang ada yang beranggapan istri tidak berkewajipan untuk mengurus rumahtangga dengan memasak, membasuh dan sebagainya karena suami perlu mengambil orang gaji

untuk istri. Perlu diingat bahawa suami berkuasa ke atas istri. Apabila suami menghendaki istri memasak untuknya ia sudah dikira sebagai arahan suami yang wajib dipatuhi. Walaubagaimanapun, tiada nash menyatakan memasak, membasuh dan sebagainya adalah tanggungjawab suami atau istri. Ia terpulang pada adat setempat dan toleransi masing-masing. Situasi di negara kita dan di mana-mana juapun di dunia menunjukkan kebiasaannya istri berperanan menguruskan rumah tangga. Justeru, adat ini dapat dijadikan hukum karena memenuhi syarat sebagai adat menurut syarak berlainan dengan harta sepencaharian sebagaimana dibincangkan.

Persoalan lain yang timbul adalah apabila asas membangun tidak langsung dijadikan ukuran, adalah ibu bapa, anak-anak, saudara dan rakan-rakan juga berhak untuk menuntut harta sepencaharian melalui pertolongan yang mereka berikan berupa nasihat, kasih sayang dan sebagainya pada individu terutama dalam bidang yang menyebabkannya berjaya? Lebih-lebih lagi yang tinggal bersama dengan individu terbabit serta menguruskan hal rumahtangganya? Justeru, definisi harta sepencaharian yang berasaskan pada sumbangan tidak langsung istri perlu dikaji semula serta diperhalusi. Bagaimana pula apabila suami istri yang diberi sebidang tanah oleh seseorang contohnya sebelum mereka berkawin dan mereka usahakan bersama secara langsung sehingga mereka berkawin dan bercerai. Adakah masing-masing boleh menuntut harta sepencaharian memandangkan ia tidak menepati definisi yang diberikan oleh undang-undang? Atau masing-masing boleh menuntutnya melalui Mahkamah Sivil.

## **2. Syarikat**

Sebagaimana dibincangkan secara ilmiah dalam penulisan ulama dan ahli akademik di Malaysia, harta sepencaharian tidak dapat dikaitkan dengan mana-mana istilah syarikat dalam ilmu fiqh melainkan syarikat al-abdan.<sup>22</sup> Itupun menurut mazhab Hanafi kerana mazhab Syafie tidak menerima konsep syarikat sebegini, namun mengaitkan harta sepencaharian dengan syarikat al-abdan tidak menepati dalil kias. Ini kerana, harta sepencaharian melibatkan harta manakala syarikat al-abdan tidak melibatkan harta. Akad diperlukan dalam hal ini. Dalam situasi suami istri, sepencaharian tidak wujud akad sedemikian. Ia dinamakan qiyas ma`a al-fariq (tidak memenuhi syarat). Sepatutnya harta sepencaharian dikiaskan pada syarikat al-amlak yaitu perkongsian harta antara dua orang atau lebih melalui pembelian, penerimaan wasiat, hadiah, sedekah atau harta pusaka.<sup>23</sup> Jelas menunjukkan inilah sandaran yang dapat dijadikan rujukan pada praktik pembagian harta sepencaharian mengikut definisi secara langsung. Syarikat ini tidak memerlukan apa-apa perjanjian atau akad, Justeru, menepati ciri-ciri dalam harta sepencaharian.

Ini bermakna istri atau suami boleh menuntut apa-apa yang mereka sumbangkan sama ada uang atau usaha pada harta yang wujud semasa perkawinan. Contohnya selepas bercerai hidup atau mati, istri boleh menuntut harta yang disumbangkan pada pembinaan rumah, peralatan rumah dan sebagainya yang dibeli secara berkongsi dengan suami atau mereka berdua membeli tanah secara bersama untuk diusahakan seperti projek perumahan atau perladangan. Kesemuanya berbentuk usaha secara langsung. Manakala usaha secara tidak langsung dapat menimbulkan unsur gharar (kesamaran dan

---

<sup>22</sup> Perkongsian dua orang atau lebih untuk menjalankan kerja dengan tenaga dan kemahiran masing-masing dan keuntungan dibagikan mengikut persetujuan.

<sup>23</sup> Ala al-Din al-Kasani, *Badai `al-Sanai*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi 1982), h. 5



ketidaktentuan yang menjejaskan akad) apabila dipraktikkan. Ini kerana, bantuan dan nasihat istri pada suami contohnya tidak dapat ditentukan kadarnya. Unsur-unsur ketidakpastian seperti ini dapat menimbulkan konflik antara dua pihak. Islam mementingkan prinsip kejelasan dalam hal-hal muamalat terutama yang melibatkan harta.

### **3. Istishab**

Hujah dari sudut nash yang secara langsung dikaitkan dengan harta sepencaharian tidak didapati dalam Al-Quran atau Hadis. Namun tidak bermakna ia tidak disyariatkan. Islam adalah agama dan cara hidup yang sempurna. Ia disempurnakan melalui ayat 3 surah al-Maidah yang menyatakan dengan jelas kesempurnaan Islam. Ini bermakna segala keperluan dan kehendak manusia terdapat dalam Al-Quran atau Hadis. Cuma kewujudannya secara langsung atau tidak. Istishab ialah kaedah berpegang pada dalil akli atau syarak serta mengetahui secara pasti atau tidak ketidakwujudan unsur yang mengubah<sup>24</sup> Kaedah yang masyhur berbunyi “Hukum asal bagi perkara muamalat adalah diharuskan melainkan terdapat dalil yang menunjukkan sebaliknya”. Berpandukan kaedah ini pemhagian harta sepencaharian adalah satu bentuk muamalat yang diharuskan selagi ia tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip syariat yang lain.

### **D. Peruntukan Harta Sepencaharian Menurut Kitab-Kitab Fiqh Dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan**

---

<sup>24</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa fi`ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-`ilmiyyah 1996), h.160.

Harta sepencaharian yaitu harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama terikat oleh tali perkawinan, atau harta yang dihasilkan dari perkongsian suami istri. Untuk mengetahui hukum perkongsian ditinjau dari sudut Hukum Islam, maka perlu membahas perkongsian yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menurut pendapat para Imam madzhab. Dalam kitab-kitab fiqh, perkongsian itu disebut sebagai syirkah atau syarikah yang berasal dari bahasa Arab. Para ulama berbeda pendapat dalam membagi macam-macam syirkah. Adapun macam-macam syirkah yaitu :

1. Syirkah Milk ialah perkongsian antar dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya sesuatu aqad atau perjanjian.
2. Syirkah Uquud yaitu beberapa orang mengadakan kontrak bersama untuk mendapat sejumlah uang. Syirkah ini berjumlah 6 (enam ) macam yaitu :
  - a. Syirkah Mufawadlah bil Amwal (perkongsian antara dua orang atau lebih tentang sesuatu macam perniagaan).
  - b. Syirkah ‘Inan bil Amwal ialah perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan, atau segala macam perniagaan .
  - c. Syirkatul ‘Abdan Mufawadlah yaitu perkongsian yang bermodal tenaga.
  - d. Syirkatul ‘Abdan ‘Inan ialah kalau perkongsian tenaga tadi disyaratkan perbedaan tenaga kerja dan perbedaan tentang upah.
  - e. Syirkatul Wujuh Mufawadlah yaitu perkongsian yang bermodalkan kepercayaan saja.
  - f. Syirkatul Wujuh ‘Inan yaitu perkongsian kepercayaan tanpa syarat.

Syirkah 'Inan disepakati oleh ulama tentang bolehnya, sedangkan syirkah mufawadlah hukumnya boleh menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Tetapi menurut madzhab Syafi'i tidak boleh. Abu Hanifah mensyaratkan sama banyak modal antara masing-masing peserta perkongsian. Untuk Syirkah Abdan boleh menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, dan tidak boleh menurut madzhab Syafi'i. Bedanya Imam Malik mensyaratkan pekerjaan yang mereka kerjakan harus sejenis<sup>16</sup> dan setempat. Syirkah wujud boleh menurut Ulama Hanafiah dan Ulama Hanabilah dan menurut Imam Maliki dan Syafi'i tidak boleh.<sup>25</sup>

Alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan syirkah mufawadlah karena nama perkongsian itu percampuran modal. Imam Malik berpendapat, bahwa dalam syirkah mufawadlah masing-masing kongsi telah menjualkan sebagian dari hartanya dan juga mewakilkan kepada kongsinya yang lain. Tetapi Imam Syafi'i menolak pendapat ini, bahwa perkongsian bukan jual beli dan bukan pula memberikan kuasa.

Alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan syirkah abdan karena perkongsian hanya berlaku pada harta, bukan pada tenaga. Alasan Imam Malik membolehkan perkongsian tenaga karena orang yang berperang sabil juga berkongsi tentang ghanimah.<sup>26</sup>

Dari macam-macam syirkah serta adanya perbedaan pendapat dari para Imam madzhab dan melihat praktek harta sepencaharian dalam masyarakat Malaysia dapat disimpulkan bahwa harta sepencaharian termasuk dalam syirkah abdan / mufawadlah.

Praktek harta sepencaharian dikatakan syirkah abdan karena kenyataan bahwa sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Malaysia samasama bekerja

---

<sup>25</sup> Abd. Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'Alal 'L-Madzaahibil Al-Arba'ah Jilid III*, Darul Kutub Al Ilmiah, Beirut, 1990 M / 410 H, hlm1. 71

<sup>26</sup> Ibnu Rusyd Al Qurtuby Al andalusy, *Bidayatul 'l-Mujtahid*, (Beirut: Darul Fikr, 1977), Juz 2, h.192

membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka, kalau keadaan memungkinkan juga untuk meninggalkan kepada anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia. Suami isteri di Malaysia samasama bekerja mencari nafkah hidup. Hanya saja karena fisik isteri berbeda dengan fisik suami maka dalam pembagian pekerjaan disesuaikan dengan keadaan fisik mereka. Selanjutnya dikatakan syirkah mufawadah karena memang perkongsian suami isteri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan mereka termasuk harta sepencaharian, kecuali yang mereka terima sebagai warisan atau pemberian khusus untuk salah seorang diantara mereka berdua.<sup>27</sup>

Pada perkongsian harta sepencaharian tidak ada penipuan, meskipun barangkali pada perkongsian tenaga dan syirkah mufawadlah terdapat kemungkinan terjadi penipuan. Sebab perkongsian antara suami isteri, jauh berbeda sifatnya dengan perkongsian lain. Waktu dilakukan ijab qabul akad nikah, perkawinan itu dimaksudkan untuk selamanya. Perkongsian suami isteri tidak hanya mengenai kebendaan tetapi juga meliputi jiwa dan keturunan.<sup>28</sup>

Secara logika perkongsian itu boleh karena merupakan jalan untuk mendapatkan karunia Allah, seperti dalam firman Allah surat Al-Jum'ah ayat 10. Adapun bunyi ayat tersebut yaitu :

قضيت

*"Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebarlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah"*

---

<sup>27</sup> Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Cet. 11, h. 78-79

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 102-103

Mengingat perkongsian itu banyak macamnya terjadilah selisih pendapat tentang kebolehan. Perkongsian yang menurut ulama tidak diperbolehkan yaitu yang mengandung penipuan.

Dalam kaitannya dengan harta kekayaan disyari'atkan peraturan mengenai muamalat. Karena harta sepencaharian hanya dikenal dalam masyarakat yang adatnya mengenal percampuran harta kekayaan maka untuk menggali hukum mengenai harta sepencaharian digunakan qaidah kulliyah yang berbunyi :

*“adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”*<sup>29</sup>

Dasar hukum dari qaidah di atas yaitu firman Allah surat al Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

المولود له رزقهن وآسوتهن

*“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”*

Dalam ayat itu Allah menyerahkan kepada urf penentuan jumlah sandang pangan yang wajib diberikan oleh suami kepada istri yang mempunyai anaknya.

Qaidah Al-‘Adatu Mukhakkamah dapat digunakan dengan syaratsyarat tertentu:

1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum.
2. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.

---

<sup>29</sup> Dato’ Aria Diraja Dato’ Hj. Daud bin Muhammad, Jurnal Hukum, (Kota Bharu:Percetakan Nasional Berhad, 2002), h.7

3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
4. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan.
5. Tidak bertentangan dengan nash.<sup>30</sup>

Hukum Qur'an tidak ada memerintahkan dan tidak pula melarang harta sepencaharian itu dipisahkan atau dipersatukan. Jadi, dalam hal ini hukum Qur'an memberi kesempatan kepada masyarakat manusia itu sendiri untuk mengaturnya. Apakah peraturan itu akan berlaku untuk seluruh masyarakat atau hanya sebagai perjanjian saja antara dua orang bakal suami isteri sebelum diadakan perkawinan. Tentu saja isi dan maksud peraturan atau perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Qur'an dan Hadits.<sup>31</sup>

Masalah harta sepencaharian ini merupakan masalah Ijtihadiyah karena belum ada pada saat madzhab-madzhab terbentuk. Berbagai sikap dalam menghadapi tantangan ini telah dilontarkan. Satu pihak berpegang pada tradisi dan penafsiran ulama mujtahid terdahulu, sedang pihak lain berpegang pada penafsiran lama yang tidak cukup untuk menghadapi perubahan sosial yang ada. Sehingga masalah harta sepencaharian ini perlu dibahas dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan No 6 seksyen 122 Tahun 2002 agar umat Islam di Malaysia mempunyai pedoman fiqh yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi, sehingga terjadi keseragaman dalam memutuskan perkara di Mahkamah Syariah.

Mahkamah Syariah dalam menetapkan putusan maupun fatwa tentang harta sepencaharian mengutip langsung ketentuan hukum yang ada dalam Al-Qur'an karena

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum Sebuah Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), Cet. 11, h. 113

tidak dikenal dalam referensi syafi'iyah. Lebih jauh lagi dalam menetapkan porsi harta sepencaharian untuk suami istri digunakan kebiasaan yang berlaku setempat, sehingga terdapat penetapan yang membagi dua harta sepencaharian di samping terdapat pula penetapan yang membagi dengan perbandingan dua banding satu. Selain itu, cara harta sepencaharian dibagi sesuai dengan fungsi harta itu untuk suami atau untuk isteri.

Mengikut peruntukan dalam Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah Negeri Kelantan, Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan menjalankan perbicaraan berhubung dengan pembagian atau tuntutan kepada harta sepencaharian. Seterusnya Enakmen Keluarga Islam Negeri Kelantan di bawah seksyen 122 menjelaskan:

1. Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talak atau membuat sesuatu perintah perceraian, memerintah supaya harta sepencaharian yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkawinan dengan usaha bersama-sama mereka dibagi di antara mereka atau supaya mana-mana harta itu dijual dan hasil jualan itu dibagi di antara pihak-pihak itu.
2. Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen kecil (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang-
  - a. Takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk uang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu;
  - b. Apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;
  - c. Keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkawinan itu, jika ada, dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembagian yang sama banyak.
3. Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang diperoleh dalam masa perkawinan itu dibagi antara mereka atau supaya aset itu dijual dan hasil jualan itu dibagi antara pihak-pihak itu.
4. Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada –
  - a. takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperolehi aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga;
  - b. Keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkawinan itu, jika ada, dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah boleh membagikan aset-aset itu atau hasil jualan itu

mengikut apa-apa kadar yang difikirkan munasabah, tetapi, walau bagaimana pun, pihak yang telah memperoleh aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.

5. Bagi maksud seksyen ini, rujukan-rujukan mengenai aset yang diperoleh dalam masa perkawinan termasuklah aset-aset yang dipunyai oleh satu pihak sebelum perkawinan itu yang telah dimajukan pada sebagian besarnya dalam masa perkawinan itu oleh pihak yang satu lagi itu atau dengan usaha bersama mereka.<sup>32</sup>

Enakmen-Enakmen tersebut telah berlaku sejak dari 2002 dan sebelum daripada itu, undang-undang tahun 1884, undang-undang 1919 , undang-undang tahun 1953 dan undang-undang 1966. Mahkamah Syariah juga diberi kuasa untuk menjalankan perbicaraan berhubung dengan harta sepencaharian.

Peruntukan-peruntukan seumpama itu juga terdapat di negeri-negeri di Malaysia. Islam mengakui bahawa a`adat, baik secara khusus atau umum adalah menjadi salah satu sumber hukum Syarak dan sesuatu a`adat itu boleh diterima apabila sudah menjadi kelaziman atau kebiasaannya sedemikian. Apabila harta sepencaharian tidak terdapat dalam kitab-kitab fiqh secara khusus membicarakan, tidakkah boleh kita terima ianya sebagai suatu a`adat bagi orang-orang Melayu apabila berkawin dan sama-sama berusaha baik di dalam rumah atau di luar rumah dan harta-harta yang diperolehi dari usahasama itu menjadi harta bersama. Jika ini boleh diterima, apakah a`adat seperti ini boleh diterima oleh Islam? Jawapan kepada persoalan ini tidaklah mudah, persoalan ini perlu dikaji dan diputuskan oleh maupun Majlis Fatwa Kebangsaan atau Muzakarah Mufti-Mufti.

Boleh dikatakan semua negeri dalam Malaysia telah memperuntukkan dalam Enakmen masing-masing berhubung dengan pembagian harta sepencaharian apabila

---

<sup>32</sup> Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan No 6 Tahun 2002, *loc.cit.*



berlaku perceraian dan tuntutan-tuntutan bersabit dengannya, dan setiap Enakmen sebelum dapat dilaksanakan mesti mendapat ampuni perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan bagi negeri-negeri beraja atau perkenan Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Agong atau Yang Dipertua Negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Muamalat suami istri bagi menghasilkan harta sepencaharian itu termasuk di bawah muamalat Syarikat al-Abdan yang diterima dan sah dalam mazhab Abu Hanifah tanpa mengira jenis pekerjaan maupun sama atau berlainan. Tidakkah ini menunjukkan bahwa negeri-negeri yang sudah ada peruntukan undang-undang seperti itu, pada lahirnya atau secara tidak langsungnya telah menerima dan mengamalkan menurut pendapat Imam Hanafi dalam membuat keputusan di Mahkamah-Mahkamah Syariah bersabit dengan harta sepencaharian. Sungguhpun demikian dalam pelaksanaan undang-undang terutama yang bersangkutan dengan Hukum Syarak dan pelaksanaannya di Mahkamah Syariah, penulis berpendapat perlu mendapat ampuni perkenan dan keizinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan secara khusus mengikut seksyen 37 daripada Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 yang menyatakan-

‘Jika Majlis atau Jemaah Ulamak berpendapat bahawa qaul yang muktamat dari mazhab Syafie boleh membawa kepada keadaan yang berlawanan dengan kepentingan awam, majlis atau Jemaah Ulamak bolehlah dengan keizinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan mengikut qaul dari mana-mana Mazhab Islam yang muktabar kecuali dalam perkara-perkara yang bersangkutan dengan akidah, maka qaul ahli Sunnah Wal Jamaah hendaklah diikuti.’<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> seksyen 37 Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994, h. 23

Peruntukan undang-undang seperti ini memang terdapat hampir di setiap negeri-negeri di Malaysia. Dan jika ini diuruskan mengikut kehendak undang-undang tersebut, sudah tentu penyelesaian harta sepencaharian sepertimana yang kita hadapi sekarang senang dan mudah diselesaikan.

## **BAB IV**

### **PEMBAGIAN HARTA SEPENCAHARIAN SETELAH PERCERAIAN DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH KOTA BHARU KELANTAN**

#### **A. Putusan Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan tentang pembagian harta Sepencaharian mengikut Enakmen Keluarga Islam Kelantan Di Bawah Seksyen 122.**

Berdasarkan kewenangannya untuk memeriksa dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepada Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan telah berhasil mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap kasus-kasus tuntutan harta sepencaharian yang berlaku pada tahun 2010. Menurut statistik Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan, kasus-kasus berkenaan tuntutan harta sepencaharian setelah perceraian pada tahun 2010 adalah sebanyak 22 kasus.<sup>1</sup> Dengan ini Penulis telah mengambil 8 sampel kasus untuk diteliti dan di analisa. Ini adalah karena dari 22 kasus itu terdapat kesamaan kasus antar satu sama lain yaitu dari segi pembagiannya ada yang 1/2 bagi istri yang menyumbangkan sumbangan secara langsung, 1/3 bagi istri yang menyumbangkan sumbangan secara tidak langsung, dan 1/4 bagi istri yang dimadukan atau istri kedua dan hanya menyumbangkan sumbangan secara tidak langsung. Dari delapan kasus tersebut, perceraian yang berlaku adalah disebabkan ketidaksefahaman antar pasangan suami istri menyebabkan perceraian terjadi dan ada satu kasus yaitu kasus antar Rusiah Abd Manaf dan Ismail Mohamad (Kasus Mal No 03100-105-1046-2010), perceraian mereka terjadi

---

<sup>1</sup> Catatan statistic dokumen yang diperdapat pada Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu 2010, *loc.cit.*

dengan cara tebus talak karena pihak istri tidak lagi menyintai dan menyayangi pihak suami dengan alasan suami tidak menunaikan tanggungjawabnya dengan baik dan berpoligami.<sup>2</sup> Peratus perceraian dengan cara tebus talak adalah sebanyak 10% manakala perceraian yang disebabkan ketidaksefahaman pasangan suami istri adalah sebanyak 90%. Ini adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan tuntutan harta sepencaharian yang berlaku di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan pada tahun 2010.<sup>3</sup> Namun demikian menurut Enakmen Keluarga Islam Kelantan, sebab perceraian tidak diambil kira oleh Mahkamah dalam membicarakan kasus-kasus berkaitan dengan harta sepencaharian.

Antara kasus-kasus yang telah diputuskan di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan adalah:

1. Kasus Rusiah Abd Manaf sebagai penggugat dan Ismail Mohamood sebagai tergugat yang berasal dari Pasir Puteh, Kelantan, menetap di Kota Bharu, mereka telah berkawin pada tahun 1972 dan bercerai pada 21 November 2009 melalui cara tebus talak di Mahkamah Syariah Pasir Puteh dan dikaruniai empat orang cahaya mata. Pihak Penggugat telah menuntut harta sepencaharian di Mahkamah Tinggi Kota Bharu di bawah Enakmen Undang-undang Keluarga Islam No 6 Tahun 2002, kasus ( Mal No 03100-105-1046-2010) Tanggal 18 Juni 2010 berkenaan sebuah rumah yang telah didirikan di Kota Bharu oleh suaminya semasa perkawinan dengannya lalu akan tapi rumah itu

---

<sup>2</sup> Putusan Mal No 03100-105-1046-2010

<sup>3</sup> Catatan statistic dokumen yang diperdapat pada Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu 2010, *loc.cit.*

sekarang telah diduduki oleh Tergugat dengan istri barunya setelah bercerai dengan Penggugat.

Mahkamah telah memutuskan bahwa harta yang menjadi pertikaian ialah harta sepencaharian hasil daripada sumbangan tidak langsung isteri yang menjaga rumah dengan merawatnya dan menjaganya dengan baik. Mahkamah memerintahkan supaya rumah itu dibagi sama rata antara penggugat dan tergugat.<sup>4</sup>

2. Kasus Wan Deraman Wan Talib sebagai penggugat dan Siti Fatimah Majid sebagai tergugat, yang berkawin pada tahun 1953 dan bercerai pada tahun 1998 dan dikaruniai seramai 6 orang anak, Pihak Penggugat telah menuntut harta sepencaharian di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu di bawah Enakmen Undang-undang Keluarga Islam No 6 Tahun 2002, kasus ( Mal No 03100-19 - 0010- 2010) Tanggal 08 Januari 2010 berkenaan dengan lot-lot tanah yang telah dibeli oleh Penggugat dan dinamakan kepada nama istri (Tergugat) untuk mengelakkan dari cukai pendapatan.

Mahkamah telah memutuskan bahwa harta yang menjadi pertikaian ialah harta sepencaharian hasil daripada sumbangan suami yang membeli lot-lot tanah yang dinamakan kepada nama istri untuk mengelakkan dari cukai pendapatan. Mahkamah memerintahkan supaya lot-lot tanah itu dibagi sama rata antara penggugat dan tergugat.<sup>5</sup>

3. Dalam kasus Sarimah Hussin sebagai Penggugat lawan Mohd Dalnia Mokhtar sebagai Tergugat, yang berkawin pada tahun 2001 dan bercerai pada tahun 2008

---

<sup>4</sup> Putusan Mal No 03100-105-1046-2010

<sup>5</sup> Putusan Mal No 03100-19-0010-2010

dari Tanah Merah, Kelantan, Pihak Penggugat telah menuntut harta sepencaharian di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu di bawah Enakmen Undang-undang Keluarga Islam No 6 Tahun 2002, kasus ( Mal No 03100-154-0762-Tahun 2010) Tanggal 15 Ogos 2010 berkenaan hutang modal Penggugat sebanyak RM43,000.00.

Mahkamah telah memutuskan bahwa pihak tergugat harus membayar balik hutang modal kepada penggugat sebanyak RM43,000.00 secara ansuran bulanan sehingga selesai. Ini adalah karena mantan istri telah menyumbangkan modal tersebut kepada mantan suami semasa membuka perniagaan komputer mereka di Tanah Merah, Kelantan.<sup>6</sup>

4. Kasus Rozyani Zakaria sebagai Penggugat lawan Muhd Zuki Md. Yusoff sebagai Tergugat, yang berkahwin pada tahun 1988 dan bercerai pada tahun 2007 dari Kota Bharu, Kelantan, Pihak Penggugat telah menuntut harta sepencaharian di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu di bawah Enakmen Undang-undang Keluarga Islam No 6 Tahun 2002, kasus ( Mal No 03100-132-0752/Tahun 2010) Tanggal 15 September 2010 berkenaan rumah teres satu tingkat di Kota Bharu yang bernilai RM60.000.00.

Mahkamah telah memutuskan bahwa pihak tergugat harus membagi nilai harta mereka yang berupa rumah teres satu tingkat di Kota Bharu yang bernilai RM60.000.00 dibagikan 50/50. Ini adalah karena sumbangan mantan isteri yang sama-sama mengumpul harta sehingga dapat membeli rumah itu.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Putusan Mal No 03100-154-0762-2010

<sup>7</sup> Putusan Mal No 03100-132-0752-2010

5. Kasus di antara Siti Fatimah Ahmad dan Mohamad Kamal Idris telah berkahwin selama Sembilan tahun dan dikaruniai dua orang anak. Kasus ini diajukan ke pengadilan Mahkamah Rayuan Syariah, Kota Baharu di bawah ( Rayuan Mal No; 03000-17-0010-2010) Tanggal 10 pebruari 2010. Penggugat ( istri ) dalam kasus ini telah menuntut harta sepencaharian dari Tergugat (suami) di bawah seksyen 122 Enakmen Undang- Undang Keluarga Islam No 6 Tahun 2002 Negeri Kelantan. Di Mahkamah Tinggi Syariah, Penggugat berhujah bahwa harta-harta yang menjadi subjek pertikaian yaitu sebuah rumah teres dua tingkat, sebuah kereta proton Waja dan saham-saham, dibagi sama rata di antara beliau dan tergugat. Yang arif hakim bicara menolak hujah Penggugat, namun memberikan putusan dalam kasus ini, Penggugat berhak mendapat 1/3 dari jumlah tuntutan harta sepencaharian terhadap Tergugat setelah meneliti segala sumbangan pihak Penggugat dalam memperoleh harta-harta tersebut. Harta-harta sepencaharian Penggugat dan Tergugat:
- i. Sebuah rumah teres dua tingkat dan tapak tanah rumah No. PTD 28767, Mukim Kluang, Johor, No. Hakmilik HSD 34516 bernilai RM38,880.
  - ii. Sebuah Kereta Waja 1.6 Nomor Polisi JGH 508 senilai RM32,686.
  - iii. Saham-saham Publik Bank senilai RM15,000.
- Menjadi jumlah harta sepencaharian senilai RM86,566
  - Mahkamah memutuskan 1/3 dari jumlah nilai harta sepencaharian kepada Penggugat yaitu sebesar RM28,855.33.<sup>8</sup>
6. Kasus di antara Rosnah Binti Saad dan Hussin bin Mamat telah berkawin pada tahun 1973 dan telah bercerai pada 29 April 1993 di Mahkamah Qadi Kota Bharu.

---

<sup>8</sup> Putusan Mal No 03100-132-0752-2010

Mereka telah berkawin selama 20 tahun dan dikaruniai enam orang anak. Selama dalam perkawinan, Penggugat merupakan ibu rumahtangga, manakala Tergugat bekerja sebagai guru. Sepanjang hidup bersama Penggugat dan Tergugat telah membeli sebuah rumah yang beralamat No Lot 289. No Hak milik 16638, Seksyen 23, Kota Bharu, Kelantan yang nilainya sebanyak RM206,000,00.

Dalam kasus ini, Penggugat membuat rayuan terhadap putusan yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah: ( Kasus Mal Bil : 03100-17-0603 Tahun 2010 ) berkaitan dengan tuntutan harta sepencaharian pada 15 Januari 2010, memutuskan Penggugat mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dan Tergugat mendapat  $\frac{2}{3}$ .

Kemudian kasus ini diajukan ke Mahkamah Rayuan Syariah Kota Bharu di bawah ( Kasus Rayuan Mal BIL : 03000-017-0004 Tahun 2010 ) Mahkamah Rayuan bersidang pada hari khamis 26 Juni 2010, jam 10.20 pagi di hadapan anggota-anggota Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan. Setelah meneliti kedua belah pihak dan mendengar hujah-hujah dari kedua belah pihak dan meneliti rekod-rekod rayuan dan dokumen-dokumen berkaitan, maka dengan persetujuan membenarkan rayuan Penggugat dan Mahkamah memerintahkan seperti berikut:

- i. Putusan perintah Mahkamah Tinggi pada 15 Januari 2010, dibatalkan dan diganti dengan putusan berikut:

Mahkamah memerintahkan Tergugat Hussin bin Mamat membayar kepada Rosnah binti Saad sebanyak RM37,869,00 yaitu  $\frac{1}{3}$  dari nilai bersih rumah



No Lot 289, hak milik G16638, syeksyen 23, Kota Bharu Kelantan yang berjumlah RM113,607.74 sebagai harta sepencaharian.

ii. Kos biaya rayuan ditanggung oleh Tergugat.,<sup>9</sup>

7. Kasus di antara Noriah binti Daud ( Penggugat ) dan Sulaiman bin Osman ( tergugat ), kasus ini diajukan ke Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu, Kasus Mal Bil: 03100-099-0926 / Tahun 2010 bahwa putusan yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi Tuan Hj Abdullah bin Man pada 22 Januari 2010 mengenai harta tidak bergerak yaitu:

i. Tanah Lot Pt Lot 1412 Mukim Padang Bongor, Kota Bharu hendaklah dibagi dua. Satu bagian milik penggugat dan satu bagian milik Tergugat atau dibagi uang sama banyak apabila dijual.

ii. Tanah lot 1600 Mukim Mentuan, Kota Bharu hendaklah dibagi dua. Satu bagian milik Penggugat dan satu bagian milik Tergugat atau dibagi uang sama banyak apabila dijual.

Penggugat dalam kasus ini tidak berpuas hati di atas putusan hakim Mahkamah Tinggi Syariah, kemudian kasus ini dibawa ke Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan. Mahkamah Rayuan Syariah Kasus Rayuan Bil: 03000-17-0006 Tahun : 2010 yang bersidang pada hari ahad tanggal 2 september 2010 jam 10:30 pagi, telah mendengar hujah-hujah dari Peguam Syarie kedua belah pihak dan meneliti keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Kasus Mal Bil: 03100-099-0926 Tahun 2010 didapati bahwa keputusan Mahkamah tersebut jelas dan nyata memerintahkan agar tanah di Lot Pt 1412 Mukim Padang Bongor, Kota

---

<sup>9</sup> Putusan Rayuan Mal No 03000-017-0004-2010

Bharu dan tanah Lot 1600 Mukim Mentuan, Kota Bharu hendaklah dibagi dua. Satu bagian milik Penggugat dan satu bagian milik Tergugat atau dibagi uang sama banyak apabila dijual. Mahkamah juga telah menolak rayuan Penggugat dan bayaran ditanggung oleh masing-masing.<sup>10</sup>

8. Kasus di antara Salmah binti Che Lah berusia 44 tahun sebagai Penggugat dan Mohd Noor bin Ismail sebagai Tergugat, mereka pernah berkawin dan hasil dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak. Penggugat juga merupakan istri kedua kepada Hasnah binti Sulong dan Penggugat juga tidak bekerja.

Penggugat kemudiannya mengajukan ke Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan, Kota Bharu dalam kasus Rayuan Bil: 03000-17-0012 Tahun 2010 yang bersidang pada tanggal 12 Disember 2010. Setelah mendengar keterangan-keterangan dari Peguam Syarie kedua belah pihak dan meneliti segala rekod dan dokumen, maka Mahkamah memutuskan bahwa sebagian dari harta-harta yang dituntut hendaklah dibagi empat Penggugat mendapat  $\frac{1}{4}$  yaitu :

- i.  $\frac{2}{3}$  dari tanah Lot No 1133 Mukim Pengkala, Pasir Puteh bernilai RM90,666,00.
- ii. Tanah Lot No 154 Mukim Gong Datok Barat, Pasir Puteh bernilai RM11,000,00.
- iii. Reban ayam atas Lot 1438 Mukim Kandis, Pasir Puteh bernilai RM54,000,00.
- iv. Jumlah keseluruhan harta yang dituntut adalah RM155,666,00.

---

<sup>10</sup> Putusan Rayuan Mal No 03000-17-0006-2010

Mahkamah memerintahkan 1/4 bagian dari RM155,666,00 diberi kepada Penggugat dan Tergugat hendaklah membayar kepada Penggugat sebanyak RM38,916,50 dan Mahkamah juga mengarahkan Tergugat membayar kos pembicaraan.<sup>11</sup>

Harta sepencaharian umumnya dibagi di antara suami dan istri. Pembagian harta sepencaharian menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan No 6 Tahun 2002 diatur di bawah seksyen 122, yaitu mahkamah mempunyai kuasa memerintah pembagian harta, membicara kasus-kasus dan menetapkan kadar bagian harta di antara suami istri setelah dibicarakan. Dalam masalah harta sepencaharian hakim bicara akan merujuk dan berpandukan kepada seksyen 122.

Menurut Seksyen 122, Kuasa Mahkamah memerintah pembagian harta sepencaharian:

1. Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talak atau membuat sesuatu perintah perceraian, memerintah supaya harta sepencaharian yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkawinan dengan usaha bersama-sama mereka dibagi di antara mereka atau supaya mana-mana harta itu dijual dan hasil jualan itu dibagi di antara pihak-pihak itu.
2. Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen kecil (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang-
  - i. Takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk uang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu;
  - ii. Apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;
  - iii. Keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkawinan itu, jika ada, dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembagian yang sama banyak.
3. Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi dalam masa perkawinan itu dibagi antara mereka atau supaya aset itu dijual dan hasil jualan itu dibaagi antara pihak-pihak itu.
4. Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada –

---

<sup>11</sup> Putusan Rayuan Mal No 03000-17-0012-2010

- i. takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperoleh aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga;
  - ii. Keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkawinan itu, jika ada dan tertakluk kepada pertimbangan –pertimbangan itu, Mahkamah boleh membagikan aset-aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkan munasabah, tetapi, walau bagaimana pun, pihak yang telah memperoleh aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.
5. Bagi maksud seksyen ini, rujukan-rujukan mengenai aset yang diperoleh dalam masa perkawinan termasuklah aset-aset yang dipunyai oleh satu pihak sebelum perkawinan itu yang telah dimajukan pada sebagian besarnya dalam masa perkawinan itu oleh pihak yang satu lagi itu atau dengan usaha bersama mereka <sup>12</sup>

Menurut Enakmen Negeri Kelantan memperuntukan pembagian harta sepencaharian yang saksama mengikut usaha, modal dan tenaga. Dari kasus-kasus yang telah diputuskan pembagian harta sepencaharian ini berlaku di sekitar atau diantara 1/2 atau 1/3 atau 1/4 untuk istri dan 1/2 atau 2/3 untuk suami. <sup>13</sup>

Daripada delapan kasus yang telah dinyatakan diatas, Mahkamah telah memutuskan bahwa jumlah harta sepencaharian yang harus dibagi boleh dilihat dari table di bawah:

Pembagian	1/2	1/3	1/4
Kasus yang diputuskan di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan	1)Mal No 03100-105-1046-2010 2)Mal No 03100-19-0010-2010 3)Mal No 03100-	1)Rayuan Mal No 03000-17-0010-2010 2)Rayuan Mal No 03000-017-0004-2010 3)Rayuan Mal	1)Rayuan Mal No 03000-17-0012-2010

<sup>12</sup> Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Kelantan No6 Tahun 2002, *Loc.cit.*

<sup>13</sup> Abd.Kadir Hj. Muhammad, *op.cit.*, h.104

	132-0752-2010	No 03000-17-0006-2010	
--	---------------	-----------------------	--

Prinsip atau kaedah yang digunakan dalam menetapkan kadar pembagian harta sepencaharian oleh hakim bicara adalah prinsip sumbangan . Bentuk sumbangan secara langsung, baik bentuk tenaga atau uang maka pembagian adalah sama banyak. Jika sumbangan tidak secara langsung yaitu istri sebagai ibu rumahtangga, maka Mahkamah memutuskan istri berhak mendapat 1/3 atau 1/4.

Adapun istri yang dapat 1/3 dari harta sepencaharian ditemukan pada istri yang tidak bekerja dan hanya menyumbangkan sumbangan secara tidak langsung saja <sup>14</sup> seperti kasus antara Rosnah binti Saad dan Hussin bin Mamat di mana pihak Penggugat mendapat 1/3 daripada harta sepencaharian karena penggugat adalah seorang surirumahtangga.<sup>15</sup>

Adapun istri yang dapat 1/4 dari harta sepencaharian ditemukan pada istri yang dimadukan sebagai ibu rumahtangga<sup>16</sup>, seperti kasus Salmah binti Che lah yang merupakan istri kedua Mohd Noor bin Ismail. Salmah telah membuat tuntutan harta sepencaharian daripada Tergugat yaitu Mohd Noor bin Ismail di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan dan hasil daripada itu, Mahkamah telah membuat putusan bahawa Salmah mendapat 1/4 daripada harta sepencaharian karena beliau adalah istri kedua kepada Mat Ariffin <sup>17</sup>

Adapun istri yang mendapat 1/2 yaitu istri yang turut memberi penghasilan dalam mendapatkan harta secara langsung, baik bentuk tenaga atau uang maka pembagian

---

<sup>14</sup> Abd.Kadir Hj. Muhammad, *op.cit.*, h.104

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Putusan Rayuan Mal No 03000-17-0012-2010

adalah sama banyak seperti kasus antara Noriah binti Daud ( Penggugat ) dan Sulaiman bin Osman ( tergugat ) di mana Mahkamah telah memutuskan bahawa harta sepencaharian mereka harus dibagi dua bersandarkan bahwa Penggugat turut sama menyumbangkan harta secara langsung <sup>18</sup>.

Dapat dijelaskan di sini bahwa, kadar pembagian harta sepencaharian menurut Enakmen Keluarga Islam Kelantan didasarkan kepada penghasilan atau sumbangan dalam mendapatkan harta baik suami ataupun istri. Pihak Mahkamah yang dipertanggungjawabkan dalam menentukan kadar pembagiannya setelah memeriksa dan meneliti siapa yang berhak mendapat  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ , atau  $\frac{1}{4}$ .

## **B. Pertimbangan Dan Dasar Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Kasus Harta Sepencaharian Di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Baharu Kelantan**

Sengketa pembagian harta sepencaharian sebagai akibat dari perceraian suami istri tidak terjadi di setiap negara Islam. Sengketa seperti ini hanya terjadi dalam masyarakat yang mengenal adanya harta sepencaharian. Adanya apa yang disebut harta sepencaharian dalam suatu rumah tangga, pada awalnya didasarkan atas adat istiadat dalam suatu wilayah yang tidak memisahkan adanya hak milik, yaitu hak milik dari masing-masing pasangan. Dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta istri tidak mengenal adanya harta sepencaharian. Dalam masyarakat Islam seperti ini harta sepencaharian suami selama dalam masa perkawinan

---

<sup>18</sup> Putusan Rayuan Mal No 03000-17-0006-2010)

tetap dianggap sebagai harta suami, bukan dianggap sebagai harta bersama istri. Istri berkewajiban menjaga serta memelihara harta suami yang berada dalam rumah.

Bila istri mempunyai penghasilan sendiri maka hasil usahanya tidak dicampurbaurkan dengan harta suami. Jika suatu saat suami mendapat kesulitan dalam pembiayaan, maka jika suami menggunakan harta istri, berarti suami telah berhutang kepada istri yang wajib dibayar kemudian hari. Bila salah seorang meninggal dunia, maka tidak ada masalah tentang pembagian harta sepencaharian karena harta masing-masing telah terpisah sejak semula. Kelemahannya jika istri tidak mempunyai penghasilan sendiri maka istri tidak mempunyai harta, dan jika suami meninggal dunia, istri hanya mendapat pembagian harta warisan dari harta peninggalan suami. Demikian juga jika terjadi perceraian, masalah yang berhubungan dengan harta yang menjadi masalah adalah apakah istri berhak menerima nafkah selama dalam masa iddah.

Berbeda dengan masyarakat Islam yang adatnya tidak mengenal pemisahan harta suami dengan harta istri dalam rumahtangga. Dalam masyarakat yang adatnya seperti ini, setelah terjadi perkawinan otomatis harta yang dihasilkan baik dari suami ataupun dari istri menjadi satu dan biasa dikenal dengan nama harta sepencaharian. Dalam rumahtangga seperti ini, rasa kebersamaan lebih terasa dan menganggap akad nikah mengandung persetujuan kongsi dalam membina kehidupan rumahtangga. Dalam kehidupan rumahtangga seperti ini, tanpa mengecilkan arti suami sebagai seorang kepala rumah tangga, masalah perbelanjaan juga tidak dipermasalahkan siapa yang harus mengeluarkan dana untuk memenuhi kebutuhan. Jika salah satu meninggal dunia, maka masalah pertama yang harus diselesaikan dalam harta warisan adalah penyelesaian pembagian harta sepencaharian Setelah itu baru yang lain seperti wasiat, hutang dan uang

pemakamannya. Demikian pula jika terjadi perceraian, maka muncullah persoalan pembagian harta sepencaharian. Seperti yang terjadi di Kota Bharu Kelantan dan telah dinyatakan dalam Enakmen Keluarga Islam Negeri Kelantan syeksen 122 Tahun 2002.<sup>19</sup>

Dalam masyarakat Islam , sengketa pembagian harta sepencaharian biasa terjadi seperti kasus yang sedang dibahas. Penulis telah menganalisa kasus ini mengikut pandangan Fiqh dan Perundang-undangan di Kelantan. Setelah membaca delapan kasus yang telah terurai dalam bagian sebelumnya dapat dipahami bahwa persoalan yang disengketakan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat adalah tentang pembagian harta sepencaharian yang belum dibagi serta adanya harta bawaan yang masih dikuasai oleh Tergugat.

Dari hasil wawancara penulis dengan hakim, pertimbangan dan dasar putusan hakim terhadap pembagian harta sepencaharian akibat perceraian adalah sebagai berikut: Pertimbangan hakim terhadap perkara pembagian harta sepencaharian akibat perceraian dimulai dari tahap-tahap pemeriksaan yang meliputi : gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, dan pembuktian adalah sebagai duduk perkaranya yaitu segala sesuatu yang terjadi di persidangan.<sup>20</sup>

Pertimbangan hakim dalam putusannya adalah berdasarkan pada pembuktian yaitu berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi dan bukti surat. Putusan hakim berdasarkan pada gugatan yang berdasarkan hukum, dengan pembuktian hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri atau bukan? Alasan-alasan Penggugat benar atau tidak harus dibuktikan dengan bukti surat dan saksi. Sehingga

---

<sup>19</sup> Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan No 6 Tahun 2002, *loc.cit.*

<sup>20</sup> Tuan Hj.Abdullah bin Man, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu, Wawancara, tanggal 4 November 2011



hakim yakin kalau alasan Penggugat benar dan perkara tersebut dapat diputus. Wawancara dengan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu tanggal 4 November 2011 Jadi pembuktian adalah sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta sepencaharian yang diakibatkan perceraian.<sup>21</sup>

Dalam kasus pertama, Kasus ( Mal No 03100-105-1046- 2010) Tanggal 18 Juni 2010 di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu, masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mengemukakan alasan serta hujah-hujah mereka di depan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan. Dari pihak Penggugat untuk memperkuat gugatannya tentang harta sepencaharian dan harta bawaan yang masih dikuasai oleh Tergugat, dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti serta hujah-hujah yang dapat dipercayai oleh Hakim. Dengan itu Hakim Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahwa harta yang menjadi pertikaian ialah harta sepencaharian hasil daripada sumbangan tidak langsung istri yang menjaga rumah dengan merawatnya dan menjaganya dengan baik. Mahkamah memerintahkan supaya rumah itu dibagi samarata antara penggugat dan tergugat.<sup>22</sup>

Pertimbangan Hakim di sini adalah pihak Penggugat juga menyumbangkan harta kepada mereka berdua sepanjang perkawinan mereka walaupun hanya dengan sumbangan secara tidak langsung dengan menjaga rumah dan merawatnya dengan baik. Pertimbangan hakim juga kepada jumlah bilangan anak di mana pihak Penggugat yang memelihara anak-anak selepas mereka bercerai dan memerlukan belanja yang banyak untuk menanggung mereka dan hakim juga memberi pertimbangan kepada tempoh masa perkawinan mereka yaitu selama 28 tahun, maka hakim telah memberikan kepadanya

---

<sup>21</sup>Tuan Hj.Abdullah bin Man, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu, Wawancara, tanggal 4 November 2011

<sup>22</sup> Kasus Mal No 03100-105-1046-2010

1/2 daripada harta sepencaharian mereka yaitu sebuah rumah teres satu tingkat. Dengan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara dengan membagikan harta sepencaharian 1/2 antara Penggugat dan Tergugat adalah adil seadil adilnya memandangkan sebab-sebab yang telah didengar dan diadili.<sup>23</sup>

Dalam kasus kedua, kasus ( Mal No 03100-19 -0010- 2010) Tanggal 08 Januari 2010 di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu. Masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mengemukakan alasan serta hujah-hujah mereka di depan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Dari pihak Penggugat untuk memperkuat gugatannya tentang harta sepencaharian dan harta bawaan yang masih dikuasai oleh Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti serta hujah-hujah yang dapat dipercayai oleh Hakim. Dengan itu Hakim Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahwa yang menjadi pertikaian ialah harta sepencaharian hasil daripada sumbangan suami yang membeli lot-lot tanah yang dinamakan kepada nama isteri untuk mengelakkan dari cukai pendapatan. Mahkamah memerintahkan supaya lot-lot tanah itu dibagi sama rata antara penggugat dan tergugat.<sup>24</sup>

Pertimbangan Hakim di sini adalah pihak Penggugat yaitu suami yang menyumbangkan harta untuk membeli tanah itu dan menamakan tanah itu kepada nama isteri(Tergugat) untuk mengelak dari cukai pendapatan. Bagi pihak Tergugat pula hanya seorang suri rumahtangga dan menyumbangkan sumbangan secara tidak langsung saja dengan merawat dan menjaga rumah mereka dengan baik. Dengan pertimbangan Hakim

---

<sup>23</sup> Tuan Hj.Abdullah bin Man, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu, Wawancara, tanggal 4 November 2011

<sup>24</sup> Putusan Mal No 03100-105-1046-2010

dalam memutuskan perkara dengan membagi 1/2 antara Penggugat dan Tergugat adalah adil seadil adilnya memandangkan sebab-sebab yang telah didengar dan diadili.<sup>25</sup>

Dalam kasus Yang ketiga, kasus ( Mal No 03100-154-0762-2010) Tanggal 15 Ogos 2010 di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu. Masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mengemukakan alasan serta hujah-hujah mereka di depan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Dari pihak Penggugat untuk memperkuat gugatannya tentang harta sepencarian dan harta bawaan yang masih dikuasai oleh Tergugat, dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti serta hujah-hujah yang dapat dipercayai oleh Hakim. Dengan itu Hakim Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahwa pihak tergugat harus membayar balik hutang modal kepada penggugat sebanyak RM43,000,00 secara ansuran bulanan sehingga selesai. Ini adalah karena mantan istri telah menyumbangkan modal tersebut kepada mantan suami semasa membuka perniagaan komputer mereka di Tanah Merah, Kelantan.<sup>26</sup>

Pertimbangan Hakim di sini adalah pihak tergugat telah berhutang dengan pihak Penggugat sebanyak RM43,000,00 dan tidak membayarnya setelah mereka bercerai. Hakim telah memerintahkan supaya Tergugat membayar hutang itu kepada Penggugat secara ansuran bulanan dan dengan uang hasil bayaran hutang itu dapat menampung kehidupan Penggugat setelah mereka bercerai, lagi pun Penggugat yang memelihara dua orang anak mereka setelah mereka bercerai. Dengan pertimbangan Hakim dalam

---

<sup>25</sup> Tuan Hj. Abdullah bin Man, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu, Wawancara, tanggal 4 November 2011

<sup>26</sup> Putusan Mal No 03100-154-0762-2010

memutuskan perkara, adalah adil seadil adilnya memandangkan sebab-sebab yang telah didengar dan diadili.<sup>27</sup>

Dalam kasus yang keempat, , kasus ( Mal No 03100-132-0752-2010) Tanggal 15 September 2010 di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu. Masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mengemukakan alasan serta hujah-hujah mereka di depan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Dari pihak Penggugat untuk memperkuat gugatannya tentang harta sepencaharian dan harta bawaan yang masih dikuasai oleh Tergugat, dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti serta hujah-hujah yang dapat dipercayai oleh Hakim. Dengan itu Hakim Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahwa pihak tergugat harus membagi nilai harta mereka yang berupa rumah teres satu tingkat di Kota Bharu yang bernilai RM60,000,00 dibagikan 50/50. Ini adalah karena sumbangan mantan istri yang sama-sama mengumpul harta sehingga dapat membeli rumah itu<sup>28</sup>.

Pertimbangan Hakim di sini adalah pihak Penggugat turut sama mengeluarkan uang dengan bekerja sebagai seorang kerani di Jabatan Kerja Raya Kota Bharu, untuk membeli rumah teres satu tingkat yang bernilai RM60,000,00 itu dengan uang yang dikumpulnya sekian lama. Dengan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara supaya rumah itu dijual dan dibagi dua, adalah adil seadil adilnya memandangkan sebab-sebab yang telah didengar dan diadili.<sup>29</sup>

Dalam kasus kelima, putusan ( Rayuan Mal No; 03000-17-0010-2010) Tanggal 10 pebruari 2010 di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu, masing- masing Penggugat dan Tergugat telah mengemukakan alasan serta hujah-hujah mereka di depan Hakim

---

<sup>27</sup> Tuan Hj.Abdullah bin Man, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu, Wawancara, tanggal 4 November 2011

<sup>28</sup> Putusan Mal No 03100-132-0752-2010

<sup>29</sup> Tuan Hj.Abdullah bin Man, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu, Wawancara, tanggal 4 November 2011

Mahkamah Rayuan. Dari pihak Penggugat untuk memperkuat gugatannya tentang harta sepencaharian dan harta bawaan yang masih dikuasai oleh Tergugat, dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti serta hujah-hujah yang dapat dipercayai oleh Hakim. Dengan itu Hakim Mahkamah Rayuan Syariah telah memutuskan 1/3 dari jumlah nilai harta sepencaharian berupa sebuah rumah teres, sebuah kereta proton Waja dan saham Publik Bank yang bernilai RM86,566, dibagi kepada Penggugat yaitu sebesar RM28,855.33.42.<sup>30</sup>

Pertimbangan Hakim di sini adalah pihak tergugat lebih lagi menyumbangkan harta kepada mereka berdua sepanjang perkawinan mereka di mana pihak Tergugat bekerja sebagai seorang guru di SK.Sultan Ismail 1 Kota Bharu, manakala pihak Penggugat hanya seorang suri rumahtangga dan hanya menyumbangkan sumbangan secara tidak langsung saja dengan menjaga keluarga dan menguruskan rumahtangga. Dengan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara, adalah adil seadil adilnya memandangkan sebab-sebab yang telah didengar dan diadili .<sup>31</sup>

Dalam kasus keenam, ( Kasus Mal Bil : 03100-17-0603-2010 ) berkaitan dengan tuntutan harta sepencaharian pada 15 Januari 2010 di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu, masing-masing dari Penggugat dan Tergugat telah mengemukakan alasannya di muka Hakim. Dari pihak Penggugat untuk memperkuat gugatannya tentang harta sepencaharian yang belum dibagi serta harta bawaan dari Penggugat yang masih dikuasai oleh Tergugat. Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang kukuh dan hasilnya Hakim telah memutuskan bahwa segala harta Penggugat mendapat 1/3 bagian dan Tergugat mendapat 2/3.

---

<sup>30</sup> Putusan Rayuan Mal No 03000-17-0010-2010

<sup>31</sup> Tuan Hj.Abdullah bin Man, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu, Wawancara, tanggal 4 November 2011

Namun demikian pihak Penggugat tidak berpuas hati lalu mengemukakan kasus ini ke Mahkamah Rayuan Syariah Kota Bharu di bawah ( Kasus Rayuan Mal BIL : 03000-017-0004-2010 ) yang bersidang pada hari khamis 26 Juni 2010, jam 10.20 pagi di hadapan anggota-anggota Mahkamah Rayuan Syariah Kota Bharu Kelantan. Dengan bukti-bukti dan hujah-hujah serta meneliti rekod-rekod rayuan dan dokumen-dokumen berkaitan yang jelas, maka Mahkamah telah memutuskan memerintahkan Tergugat Hussin bin Mamat membayar kepada Rosnah binti Saad sebanyak RM103,000.00 sebagai harta sepencaharian dan keputusan sebelumnya di Mahkamah Tinggi Syariah dibatalkan.<sup>32</sup>

Pertimbangan Hakim di sini adalah pihak Penggugat berhak mendapat 1/2 daripada harta sepencaharian disebabkan usia perkawinan yang lama yaitu 20 tahun dan bilangan anak yang ramai yaitu 6 orang. Pihak Penggugat juga tidak bekerja untuk memenuhi keperluannya dan anak-anak. Dengan putusan Hakim dalam memutuskan perkara boleh menampung kehidupan Penggugat dan anak-anak setelah bercerai dengan Tergugat. Dengan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara, adalah adil seadil adilnya memandangkan sebab-sebab yang telah didengar dan diadili.<sup>33</sup>

Dalam kasus yang ketujuh, diajukan ke Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu, Kasus Mal Bil: 03100-099-0926-2010 bahwa putusan yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi Tuan Hj Abdullah bin Man pada 22 Januari 2010 mengenai harta tidak bergerak yaitu Tanah Lot Pt Lot 1412 Mukim Padang Bongor Kota Bharu dan Tanah lot 1600 Mukim Mentuan Kota Bharu dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.

---

<sup>32</sup> Putusan Rayuan Mal No 03000-017-0004-2010

<sup>33</sup> Tuan Hj. Abdullah bin Man, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu, Wawancara, tanggal 4 November 2011

Namun begitu Penggugat dalam kasus ini tidak berpuas hati di atas putusan hakim Mahkamah Tinggi Syariah, kemudian kasus ini dibawa ke Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan. Mahkamah Rayuan Syariah Kasus Rayuan Bil: 03000-17-0006-2010 yang bersidang pada hari ahad tanggal 2 september 2010 jam 10:30 pagi, telah mendengar hujah-hujah dari Peguam Syarie kedua belah pihak dan meneliti keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Kasus Mal Bil: 03100-099-0926-2010 didapati bahwa keputusan Mahkamah tersebut jelas dan nyata memerintahkan agar tanah di Lot Pt 1412 Mukim Padang Bongor, Kota Bharu dan tanah Lot 1600 Mukim Mentuan, Kota Bharu hendaklah dibagi dua. Satu bagian milik Penggugat dan satu bagian milik Tergugat atau dibagi uang sama banyak apabila dijual. Mahkamah juga telah menolak rayuan Perayu dan bayaran ditanggung oleh masing-masing.<sup>34</sup>

Pertimbangan Hakim di sini adalah sudah memadai bagi Penggugat mendapat satu tanah lot memandangkan terdapat hanya dua sahaja tanah lot yang mereka beli sepanjang perkawinan mereka berdua.<sup>35</sup>

Dalam kasus kedelapan, Rayuan Bil: 03000-17-0012-2010 yang bersidang pada tanggal 12 Disember 2010. Penggugat telah menuntut harta sepencaharian daripada Tergugat yang berjumlah RM155,666,00. Daripada keterangan kedua-dua belah pihak, Hakim Mahkamah Rayuan telah memutuskan harta tersebut hendaklah dibagi kepada empat 1/4 bagian dari RM155,666,00 diberi kepada Penggugat dan Tergugat hendaklah membayar kepada Penggugat sebanyak RM38,916,50 dan Mahkamah juga mengarahkan Tergugat membayar kos pembicaraan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Putusan Rayuan Mal No 03000-17-0006-2010

<sup>35</sup> Tuan Hj. Abdullah bin Man, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu, Wawancara, tanggal 4 November 2011

<sup>36</sup> Putusan Rayuan Mal No 03000-17-0012-2010

Pertimbangan hakim di sini dapat dilihat oleh karena Penggugat merupakan isteri kedua dan tidak bekerja, maka jumlah itu dikira memadai kepada Penggugat dan seorang anaknya.<sup>37</sup>

Dari delapan kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu tersebut, sesuai dengan kewenangannya, perkara perceraian yang diikuti dengan sengketa pembagian harta sepencaharian, sebagian besar diterima dan dikabulkan oleh Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Seperti dalam putusan Mal Bil: 03100-099-0926-2010, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah pembagian harta sepencaharian suami istri sebagaimana ditentukan dalam Enakmen Keluarga Islam Negeri Kelantan seksyen 122, maka Hakim mempertimbangkan bahwa apabila Penggugat dapat membuktikan bahwa benar harta yang digugat adalah harta sepencaharian, gugatan dapat dikabulkan. Sebaliknya, apabila Tergugat dapat membuktikan bahwa harta yang digugat seluruhnya atau sebagian adalah benar-benar milik pihak ketiga atau milik pribadi Tergugat sendiri, terhadap barang tersebut gugatan dinyatakan ditolak.

Dalam kaitannya dengan harta sepencaharian yang disengketakan dalam kasus-kasus di atas, kecermatan dalam memahami dan membedakan antara harta sepencaharian dan harta bawaan sangat diperlukan. Maka sesuai dengan ketentuan Enakmen Keluarga Islam seksyen 122 Tahun 2002, disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta sepencaharian diatur menurut hukumnya masing-masing.

---

<sup>37</sup> Tuan Hj.Abdullah bin Man, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu, Wawancara, tanggal 4 November 2011



Dari bunyi Enakmen tersebut, menurut pendapat Penulis dalam menetapkan suatu keputusan terutama mengenai sengketa harta sepencaharian akibat terjadinya perceraian, sudah sepantasnya hakim memberikan pertimbangan hukum, baik hukum agama, hukum adat, ataupun hukum lainnya yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang sedang menghadapi masalah.

Penulis juga telah mewawancara seorang penggugat yaitu Roayani Zakaria tentang putusan Hakim dalam hal pembagian harta sepencaharian yang telah ditempohinya. Menurut Rozyani, putusan Hakim dalam pembagian harta sepencahariannya adalah adil karena Hakim membuat pertimbangan dengan memberi 1/2 daripada harta sepencaharian mereka dengan melihat kepada sumbangan secara langsungnya dengan bekerja dan mengumpulkan uang sehingga dapat membeli sebuah rumah teres satu tingkat yang berharga RM60,000,00. Penggugat juga menyatakan bahwa dengan pembagian harta sepencahariannya oleh Hakim, hidupnya bersama anak-anaknya lebih selamat.<sup>38</sup>

Penulis juga telah mewawancara seorang Tergugat yaitu Mohd Dalnia mokhtar berkenaan putusan Hakim tentang pembagian harta sepencahariannya. Pihak Tergugat menyatakan bahwa putusan Hakim adalah benar dan dia akan membayar hutangnya daripada mantan istrinya secara ansuran sehingga lunas semuanya sebanyak RM43,000,00.<sup>39</sup>

Dalam penyelesaian masalah harta sepencaharian di antara suami dan istri menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan seksyen 122 Tahun 2002, mempunyai kekuatannya yang tersendiri, antaranya:

---

<sup>38</sup> Roayani Zakaria, wawancara, tanggal 13 Februari 2012

<sup>39</sup> Mohd Dalnia mokhtar, wawancara, tanggal 15 Februari 2012

1. Mahkamah mempunyai kuasa untuk memutuskan perselisihan berkaitan harta sepencarian sebagaimana disebut dalam syeksen 122 Tahun 2002,

(1) Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talak atau membuat sesuatu perintah perceraian, memerintah supaya harta sepencarian yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkawinan dengan usaha bersama-sama mereka dibagi di antara mereka atau supaya mana-mana harta itu dijual dan hasil jualan itu dibagi di antara pihak-pihak itu. Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen kecil (1) , Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang-

- a. Takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk uang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu;
- b. Apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;
- c. Keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkawinan itu, jika ada, dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembagian yang sama banyak<sup>40</sup>

2. Dapat menyelesaikan perselisihan mengenai harta sepencarian yang diajukan kepada Mahkamah Tinggi Syariah yang diatur dalam seksyen 122 yang mengatakan:

(1) Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang diperoleh dalam masa perkawinan itu dibahagi antara mereka atau supaya aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.<sup>41</sup>

3. Dapat menyelesaikan masalah hutang yang dibebankan kepada harta sepencarian yang merupakan hutang yang dilakukan untuk kepentingan bersama mereka. Sebagaimana yang dinyatakan dalam seksyen 122 Tahun 2002:

(2) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen kecil (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang-

---

<sup>40</sup> Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan No 6 Tahun 2002,*op.cit.*, h.105

<sup>41</sup> *Ibid.* 106

- b. Apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;<sup>42</sup>
4. Mahkamah Tinggi Syariah berkuasa mengadili sengketa harta sepencaharian dengan memeriksa, meneliti, dan membicara serta meneliti kadar pembagian harta kepada Penggugat dan Tergugat berpandukan kepada Enakmen Keluarga Islam Kelantan seksyen 122 Tahun 2002.
5. Pembagian harta sepencaharian mengikut sumbangan masing-masing secara langsung atau tidak langsung. Menurut Enakmen Keluarga Islam Kelantan, kadar pembagian harta sepencaharian ditentukan pada takat sumbangan maupun sumbangan usaha, modal dan tenaga. Jika salah satu pihak suami atau istri yang memberi sumbangan yang besar maka ianya akan mendapat kadar yang lebih besar . Pihak Mahkamah berhak membuat keputusan dalam pembagian harta sepencaharian yang saksama mengikut modal, usaha dan tenaga. Dari kasus-kasus yang telah diputuskan pembagian harta sepencaharian ini berlaku di sekitar atau di antara 1/2 atau 1/3 atau 1/4 untuk istri atau 1/2 atau 2/3 untuk suami.

### **C. Analisa Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Tinggi Syariah Dalam Hal Pembagian Harta Sepencaharian**

Penulis telah berpendapat bahwa daripada putusan-putusan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutuskan pembagian harta sepencaharian sebagaimana yang telah dinyatakan di atas adalah sangat adil. Ini adalah karena memandangkan kepada cara pembagiannya mengikut tahap sumbangan masing-masing antar suami istri.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

Jika istri menyumbangkan sumbangan secara langsung contohnya istri bekerja maka pembagiannya adalah sebanyak 1/2 dari harta sepencaharian atau sumbangan secara tidak langsung seperti menjaga dan merawat rumah, maka pembagiannya adalah sebanyak 1/3 atau 1/4 dari harta sepencaharian jika dia adalah istri yang dimadukan.

Putusan-putusan Hakim juga sesuai dengan keadaan uruf masyarakat di Kelantan dalam pembagian harta sepencaharian mengikut sumbangan yang dihasilkan oleh suami istri dan kadar pembagian harta sepencaharian dipertimbangkan oleh hakim syarie. Hal ini sejalan dengan qaidah kulliyah yang berbunyi “Al- ‘Adatu Muhakkamah”, yaitu adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum. Syarat suatu adat dapat dijadikan hukum yaitu :

- 1 Adat kebiasaan itu dapat diterima perasaan yang sihat dan diakui oleh pendapat ulama.
- 2 Sesuatu yang dikatakan adat berulang kali terjadi dan sudah umum.
- 3 Kebiasaan itu sudah berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
- 4 Tidak ada persetujuan lain antara kedua belah pihak yang berlainan dengan kebiasaan.
- 5 Tidak bertentangan dengan nash.<sup>43</sup>

Urf yaitu apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari urf. Urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Kelemahan urf sebagai dasar hukum yaitu urf itu sifatnya lokal hanya berlaku bagi masyarakat tertentu dan tidak semua urf itu sifatnya lokal hanya berlaku bagi masyarakat

---

<sup>43</sup> Dato’ Aria Diraja Dato’ Hj. Daud bin Muhammad, *Loc.cit.*

tertentu dan tidak semua urf itu sesuai dengan dalil-dalil syara' karena memang pada dasarnya urf itu ada yang shahih dan ada yang fasid.<sup>44</sup>

Putusan-putusan Hakim juga sesuai mengikut pendapat Sayed Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah, jilid 2, muka surat 174, Cetakan Tahun 1981 Darul Fikr, Beirut, Lubnan yang menerangkan di bawah tajuk- "خدمة المرأة زوجها" dengan berdasarkan ayat al-Quran surah al-Baqarah, ayat 228 Allah s.w.t. berfirman:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم

Maksudnya:

*“Dan istri-istri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajiban yang ditanggung oleh mereka terhadap suami dengan cara yang sepatutnya yakni sebagaimana seseorang istri menanggung tanggungjawab terhadap suami yang wajib dilaksanakan dengan cara yang baik. Dalam pada itu suami itu mempunyai satu darjat kelebihan atas istrinya karena suami yang berkuasa mengawalinya dan memberi nafkah dan ingatlah Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana”.*

Ayat tersebut memberi hak kepada perempuan sama dengan laki-laki dan seterusnya Sayed Sabiq menjelaskan-

والاساس الذى وضعه الاسلام للتعامل بين الزوجين وتنظيم الحياة بينهما هو أساس فطرى وطبيعى فالرجل أقدر على العمل والكسب خارج المنزل والمرأة أقدر على تدبير المنزل وتربية الاولاد وتيسير أسباب الراحة البيتية وتكف المواة ما هو من طبيعتها وبهذا ينتظم البيت من ناحية الداخل والخارج دون يجد اى واحد من الزوجين سببا من اسباب انقسام البيت على نفسه.

Maksudnya:

*“ Dasar yang ditetapkan oleh Islam dalam mengatur dan menguruskan kehidupan suami istri adalah merupakan suatu dasar yang sesuai dengan fitrah dan tabiat semulajadi manusia itu sendiri maka yang laki-laki lebih menumpukan kepada pekerjaan dan perusahaan di luar rumah , manakala perempuan lebih layak menjalankan pekerjaan di dalam rumah seperti mengurus rumahtangga, mendidik*

---

<sup>44</sup> Zamzuri Zakaria, Seminar Kebangsaan Pengurusan Harta dalam Islam, (Kuala Lumpur:Jab.Syariah UKM,2006), h. 134

*anak-anak, menyediakan segala kemudahan bagi menjadikan suasana dalam rumah tenang dan tenteram. Maka sebab itu ditugas kepada laki-laki kerja yang sesuai baginya, begitu juga ditugaskan kepada perempuan dan dengan itu barulah rumahtangga berjalan dengan baik di dalam dan di luar rumah tanpa menjejaskan mana-mana pihak”<sup>45</sup>*

Seterusnya Sayed Sabiq membawa contoh hukuman Rasulullah s.a.w. di antara Saiyidina Ali (r.a.) wakarramallahu wajhah dengan istrinya Fatimah (r.a.) di mana Rasulullah memutuskan ke atas Fatimah bertugas atau menjalankan pekerjaan di rumah, manakala Ali berusaha dan bekerja di luar rumah.

Pekerjaan masing-masing dari suami istri yang diakui oleh Rasulullah s.a.w. sebagai tanggungjawab masing-masing itu ada hubungan dengan apa yang diperolehi atau hasil yang didapati dari pekerjaan itu dan oleh karena masing-masing ada peranan dan usaha mengikut tugas masing-masing, maka sudah patut dan wajar harta yang diperolehi dari sama-sama bekerja itu dijadikan harta sepencaharian di antara suami istri selagi tidak ada apa-apa bukti atau pengakuan bahwa harta-harta yang diperolehi itu adalah hak masing-masing baik dari pemberian orang lain atau pesaka dan sebagainya.

Dari pendapat Sayed Sabiq itu dapat dinyatakan bahwa putusan yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi syariah Kota Bharu berdasarkan kepada takad sumbangan masing-masing suami istri adalah sangat adil memandangkan siapa yang lebih banyak menyumbangkan harta maka dialah yang akan mendapat lebih banyak dari harta sepencarian mereka setelah perceraian.

Untuk mengetahui hukum perkongsian ditinjau dari sudut Hukum Islam, maka dibahas tentang perkongsian yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menurut pendapat para Imam mazhab. Dalam kitab-kitab fiqh, perkongsian itu disebut sebagai

---

<sup>45</sup> Sayed Sabiq, *Kitab Fiqh al-sunnah jilid 2*, (Beirut Lubnan: Darul Fikr, 1981), h.174

syirkah atau syarikah yang berasal dari bahasa Arab. Para ulama berbeda pendapat dalam membagi macam-macam syirkah. Adapun macam-macam syirkah yaitu :

1. Syirkah Milk ialah perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya sesuatu aqad atau perjanjian.
2. Syirkah Uquud yaitu beberapa orang mengadakan kontrak bersama untuk mendapat sejumlah uang. Syirkah ini berjumlah 6 (enam ) macam yaitu :
  - a. Syirkah Mufawadlah bil Amwal (perkongsian antara dua orang atau lebih tentang sesuatu macam perniagaan).
  - b. Syirkah 'Inan bil Amwal ialah perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan, atau segala macam perniagaan .
  - c. Syirkatul 'Abdan Mufawadlah yaitu perkongsian yang bermodal tenaga.
  - d. Syirkatul 'Abdan 'Inan ialah kalau perkongsian tenaga tadi disyaratkan perbedaan tenaga kerja dan perbedaan tentang upah.
  - e. Syirkatul Wujuh Mufawadlah yaitu perkongsian yang bermodalkan kepercayaan saja.
  - f. Syirkatul Wujuh 'Inan yaitu perkongsian kepercayaan tanpa syarat.<sup>46</sup>

Jika harta yang diperoleh dalam masa perkawinan itu dibuat atas nama suami atau istri, al-Imam Ibnu Qayyim al-Juziah ada menyatakan dalam kitab al-Turuq al-Hukmiyyah Fi al-Siasah al-Syariyyah, cetakan Matba`ah Al-Madani, Mesir, Tahun 1961, halaman 24 yaitu –

ومن ذلك أن جمهور الفقهاء يقولون في تداعي الزوجين والصانعين لمتاع البيت والدكان : أن القول قول من الحال على صدقة والصحيح في هذه المسألة أنه لا عبرة باليد الحسية بل وجودها كعدمها

---

<sup>46</sup> Dato' Aria Diraja Dato' Hj. Daud bin Muhammad, *opcit.* h. 12

ولو اعتبرناها لا اعتبرنا يد الخاطف لعمامة و آخر خلفه حاسر الرأس ونحن نقطع بأن هذه يد ظالمة عادية فلا اعتبرلها.

Maksud ringkasnya :

*“ Tidak boleh dianggap semata-mata karena memegang dengan tangan atau menguasai di atas sesuatu harta dengan mendapat nama di dalam geran tanah dan sebagainya menjadi haknya seorang saja jika harta itu diperolehi semasa dalam perkawinan masih berterusan, malah adanya seperti tidak ada. Dalam hubungan ini bolehlah diqiaskan perkakas rumah dengan harta-harta lain seperti rumah, tanah dan sebagainya yang diperolehi semasa kedua-duanya masih bersuami istri selagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan bahawa harta-harta itu sudah dibahagi atau ada hak masing-masing secara berasingan”<sup>47</sup>*

Hukuman juga diputuskan berdasarkan kepada qarinah, ini adalah mengikut pendapat Dr.Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, juzuk 8, halaman 6127, Cetakan Darul Fikr Demashq, Syria

Tahun 1997 di bawah tajuk -

الشرع وذلك سواء في حال وجود البينة أو الاقرار ام في حال

فقد أى دليل من دلائل الاثبات.

Maksudnya

---

<sup>47</sup> Al-Imam Ibnu Qayyim al-Juziah, *Al-Turuq al- Hukmiyyah Fi al-Siasah al-Syariyyah*, (Mesir: Matba`ah Al-Madani,1961,) h. 24



*“ Penghakiman dengan qarinah merupakan sumber Hukum Syarie sama ada ketika ada keterangan atau pengakuan atau dalam keadaan tidak ada apa-apa bukti lain<sup>48</sup>.*

Dalam perkara qarinah ini biasanya dapat dikesan dari kenyataan Penggugat, jawapan Tergugat atau keterangan saksi-saksi dan sebagainya dalam sesuatu perbicaraan suami istri yang menunjukkan adanya qarinah yang boleh diterima bahawa perolehan atau pemilikan sesuatu harta itu adalah sebagai harta sepencarian.

---

<sup>48</sup> Dr. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Demashq Syria: Darul Fikr, 1997,) h. 6127

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan.**

Bertolak dari uraian yang dikemukakan pada beberapa bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Kota Bharu Kelantan, kasus-kasus harta sepencaharian yang dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah, kebanyakannya melibatkan tuntutan harta sepencaharian suami istri setelah berlaku perceraian. Putusan Hakim terhadap pembagian harta sepencaharian sebagai akibat terjadinya perceraian adalah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Ditinjau dari Enakmen Keluarga Islam Kelantan, sudah sesuai harta sepencaharian dibagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga masing-masing mendapat apa yang sepatutnya dari harta sepencaharian mereka. Kadar pembagian harta sepencaharian ditentukan pada takat sumbangan maupun sumbangan usaha, modal dan tenaga. Jika salah satu pihak suami atau istri yang memberi sumbangan yang besar maka ianya akan mendapat kadar yang lebih besar. Dari kasus-kasus yang telah diputuskan pembagian harta sepencaharian ini berlaku di sekitar atau antara  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ , dan  $\frac{2}{3}$ .
2. Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara harta sepencaharian dimulai dari tahap-tahap pemeriksaan. Tahap-tahap pemeriksaan itu sebagai duduk perkaranya yaitu segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Pertimbangan Hakim dalam putusannya berdasarkan pada pembuktian. Pembagian harta sepencaharian

dilakukan menurut ketentuan adat yang berlaku dan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Pertimbangan Hakim juga berdasarkan kepada kesusahan yang dialami oleh Penggugat setelah bercerai dengan suami seperti uang sarahidup, menjaga anak-anak, usia perkawinan, tidak ada kerjaya dan sebagainya. Dengan pertimbangan Hakim ini dapat memberi kesempatan kepada Penggugat ke atas harta sepencaharian mereka setelah berlaku perceraian.

3. Analisa Hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta sepencaharian:-

Pembagian harta sepencaharian mengikut sumbangan masing-masing secara langsung atau tidak langsung. Menurut Enakmen Keluarga Islam Kelantan, kadar pembagian harta sepencaharian ditentukan pada takat sumbangan samada sumbangan usaha, modal dan tenaga. Jika salah satu pihak suami atau istri yang memberi sumbangan yang besar maka ianya akan mendapat kadar yang lebih besar. Mahkamah berhak membuat keputusan dalam pembagian harta sepencaharian yang saksama mengikut modal, usaha dan tenaga. Dari kasus-kasus yang telah diputuskan pembagian harta sepencaharian ini berlaku di sekitar atau di antara  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{1}{3}$  atau  $\frac{1}{4}$  untuk istri atau  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{2}{3}$  untuk suami, seperti yang telah dituangkan dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 2002 No 6 seksyen 122, dan ini sesuai dengan maqasid al-Syar'iyah.

## **B. Saran-saran**

Dengan berakhirnya penulisan skripsi ini maka penulis akan memberikan beberapa saran antaranya:

1. Penulis menyarankan agar undang-undang mengenai harta sepencaharian dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Kelantan dikekalkan kerana ianya sesuai dengan prinsip syariah dan perlu dihalusi lagi semoga putusan yang dibuat dengan seadil-adilnya.
2. Pemerintah perlu memberi motivasi kepada masyarakat agar dapat memahami konsep harta sepencaharian dan perlu mencari jalan semoga masalah harta sepencaharian dan perceraian dapat dibendung.
3. Kepada para Hakim dan para pengacara hukum diharap mendalami pengetahuan dalam ayat-ayat hukum, kitab-kitab fikih, dan diharap dapat mengendalikan tugas dengan jujur, adil dan bertanggungjawab agar kasus-kasus dapat diselesaikan dengan segera, lancar dan putusan yang dibuat dengan seadil-adilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Imam Ibnu Qayyim al-Juziah, *al-Turuq al-Hukmiyyah Fi al-Siasah al-Syariyyah*, Matba'ah Al-Madani, Mesir, (1961)
- al-Sheikh Ahmad bin Mohd. Zain bin Mustafa al-Fatani, *Alfatawa al-Fataniah*, Fatani Press, (1377 Hijrah)
- Ahmad Ibrahim, *Islamic Law in Malaysia*, (Kuala Lumpur: Malaysian: Sociological Research Institute, 1965)
- Azlina bt Abd Latif, *Harta Sepencarian: Perlaksanaan Dan Penilaian Menurut Hukum Syarak*, (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2004)
- Ab.Kadir Hj.muhammad, Jurnal Syariah, *Harta sepencarian: konsep dan pelaksanaanya di Malaysia*, (Kuala Lumpur: ummah media sdn bhd, 1996), cet. Ke 1
- Ala al-Din al-Kasani, *Badai 'al-Sanai*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi 1982)
- Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfa fi 'ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah 1996)
- Abd. Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'Alal 'L-Madzaahibil Al-Arba'ah Jilid III*, (Darul Kutub Al Ilmiah, Beirut, 1990 M / 1410 H)
- Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum Sebuah Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), Cet. 11
- Arsip-arsip: Dokumen yang diperdapat pada Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu, Kelantan.
- Bahagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, *Sejarah Penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan*, (Kota Bharu: Mahkamah Syariah, 1998)
- Dato' Aria Diraja Dato' Hj. Daud bin Muhammad, *Jurnal Hukun, Harta sepencarian, isu-isu dan malan*, (Kuala Lumpur: UKM, 2002)
- Dato' Haji Jaafar Haji Dayat, *Jurnal hukum*, (Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Berhad, 2002)

Dr.Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Demashq, Syria:Darul Fikr, 1997)

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Kelantan No 6 Tahun 2002

Government of Kelantan Gazette, *Warta Kerajaan Negeri Kelantan*, (Kota Bharu:Pustaka Aman Press, 2004)

Ibnu Rusyd Al Qurtuby Al andalusy, *Bidayatul 'l-Mujtahid*,(Beirut:Darul Fikr,1977), Juz 2

Ismuha, *Pencabarian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, (Jakarta:Bulan Bintang,1978), Cet. 11

*Jurnal Laporan Syariah* ( Kuala Lumpur:The Malaysian CurrentnLow Journal,2008, ICLJ (Sya))

Jabatan Kehakiman Negeri Kelantan, *Pengenalan ringkas Jabatan Kehakiman Negeri Kelantan*, (kota Bharu: Mahkamah Syariah Kota Bharu,1992

Jalal al-Din `Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti ,*al-Asybah wa al-Nazair*, (Beirut:Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah 1998),

Koentjaraningrat, (1977), *Metod-metod penelitian Masyarakat*, P.T. Gramedia

Md. Akhir Hj yaacob,Siti Zalikhah md. Noor, *beberapa aspek Mengenai Enakmen Keluarga Islam di Malaysia*,(Kuala Lumpur: Al-Rahmaniah Badan Dakwah dan Kebajikan Islam Malaysia,1989),cet.Ke-1

Notis nombor 33 tahun 1919 (pembahagian harta benda laki bini) Kelantan

Prof. Madya Dr. Abdul Halim Mat Diah , *Suatu Contoh tentang Huraian Metodologi*, (Kuala Lumpur, Fakulti Usuluddin, Akademi Islam, Universiti Malaya, 1987).

Professor Ahmad Ibrahim, "*Islamic Law in Malaysia*",(Kuala Lumpur: Malaysian Sociological Research Institute,1965)

Prof. Tan Sri Datuk Ahmad Mohamed Ibrahim,*Jurnal Undang-undang*, (Kuala Lumpur:IKIM,1998)

Siti Zalikhah Md Nor, *Harta Sepencarian*, (Kota Bharu:Dian Darulnaim Shd.Bhd, 2007)

Sheikh Abdullah Basmeih, *Al-Quran Al-Karim Mushaf Tajwid dan Terjemahan dalam Bahasa Malaysia*, Kuala Lumpur:DBP,1999)

Sayed Sabiq, *Fiqh al-Sunnah jilid 2*, (Beirut, Lubnan:Darul Fikr,1981)

Undang-Undang Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan dan Mahkamah Qadhi Kelantan Tahun 1953

Zamzuri Zakaria, *Seminar Kebangsaan Pengurusan Harta dalam Islam*, (Kuala Lumpur:Jab.Syariah UKM,2006)